

**RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN WISATA PERAIRAN PULAU MARE
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020 - 2040**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2019**

**RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN WISATA PERAIRAN PULAU MARE
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020 – 2040**



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI MALUKU UTARA

2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pulau Mare (0°33' - 0°35' LU dan 127°22' - 127°24' BT) merupakan bagian dari Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pulau Mare dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Suaka Pulau Kecil (SPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan nomor 72.2 tahun 2012 dengan luas 2.810 ha. Ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah Maluku Utara No. 2 tahun 2018, merevisi penamaan kawasan Pulau Mare menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan tipe kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) dengan luasan 7.092,60 ha.

TWP Pulau Mare memiliki berbagai potensi dari segi ekologis, sosial budaya hingga ekonomi yang penting untuk dijaga dan dikembangkan manfaatnya. Potensi ekologis meliputi ekosistem terumbu karang dengan luasan total 168,27 ha, ekosistem mangrove 25,24 ha dan ekosistem padang lamun 9,68 ha. Pada ekosistem tersebut hidup berbagai jenis organisme penting seperti ikan karang dan satwa laut kharismatik (lumba-lumba dan hiu sirip hitam). Keanekaragaman hayati yang dimiliki TWP Pulau Mare telah menyokong kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Namun, interaksi tersebut di sisi lain telah menimbulkan dampak, seperti kerusakan habitat dan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) TWP Pulau Mare disusun dengan tujuan menyediakan informasi dan panduan untuk mengelola TWP Pulau Mare melalui penataan zonasi, dan penerapan strategi pengelolaan yang baik untuk dapat menjamin keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup dokumen ini meliputi penataan zonasi KKP TWP Pulau Mare seluas 7.092,60 ha yang tertuang dalam peta kawasan skala 1:50.000, yang sudah dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu, dokumen ini juga memuat rencana kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai bentuk implementasi dari strategi pengelolaan.

Penataan zonasi yang dimuat dalam dokumen RPZ TWP Pulau Mare dibagi empat zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya. Di dalam zona pemanfaatan terdapat Sub Zona Pariwisata Alam Perairan. Sedangkan zona lainnya ditujukan untuk sub zona rehabilitasi karang. Masing-masing zona memiliki target konservasi atau objek

yang ingin dilindungi. Target konservasi tersebut akan menentukan indikator pengelolaan kawasan dan menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya hayati. Kemudian berdasarkan PP 60/2007, PerMen KP 17/2008, dan PerMen KP 30/2010 disusun aturan berupa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tiap zona.

Dokumen RPZ TWP Pulau Mare juga memuat rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP). Balai ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara nomor 45 tahun 2017. Rencana pengelolaan dan zonasi selaras dengan visi kawasan konservasi TWP Pulau Mare, yaitu “Lestarinya Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut serta Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat di Taman Wisata Perairan Pulau Mare”. Visi tersebut dijabarkan melalui misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk memperkuat kelembagaan pengelola, pengawasan sumber daya, melestarikan sumber daya hayati dan kearifan lokal secara berkelanjutan, membangun sarana dan prasarana, serta pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengelolaan	3
2 POTENSI, PERMASALAHAN DAN TARGET KONSERVASI KAWASAN.....	4
2.1 Profil Umum Kawasan	4
2.2 Informasi Lingkungan Fisik	6
2.2.1 Iklim.....	6
2.2.2 Geologi	7
2.2.3 Topografi.....	7
2.2.4 Pasang Surut Air Laut.....	8
2.2.5 Parameter Air Laut.....	8
2.3 Potensi Ekologis.....	11
2.3.1 Ekosistem Terumbu Karang	11
2.3.2 Ekosistem Mangrove.....	12
2.3.3 Padang Lamun.....	13
2.3.4 Satwa Laut Kharismatik.....	13
2.4 Potensi Sosial Budaya.....	14
2.5 Potensi Ekonomi.....	15
2.6 Permasalahan Kawasan.....	15
2.7 Target Konservasi kawasan	17
3 PENATAAN ZONASI	18
3.1 Zonasi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Mare	18
3.1.1 Zona Inti	22
3.1.2 Zona Pemanfaatan (Sub Zona Pariwisata Alam Perairan)	23

3.1.3	Zona Perikanan Berkelanjutan	25
3.1.4	Zona Lainnya (Sub Zona Rehabilitasi Karang)	25
3.2	Target Konservasi, Ancaman dan Indikator Monitoring di setiap Zona.....	26
3.3	Aturan di dalam Zona	32
4	RENCANA PENGELOLAAN	35
4.1	Unit Pengelola	35
4.2	Rencana Jangka Panjang	35
4.2.1	Visi dan Misi	35
4.2.2	Tujuan dan Sasaran Pengelolaan	36
4.2.3	Strategi Pengelolaan	38
4.3	Rencana Jangka Menengah dan Tahunan.....	40
5	Penutup.....	62
	Daftar Pustaka.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Titik-titik koordinat Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare	5
Tabel 2-2 Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kota Tidore Kepulauan.....	7
Tabel 3-1 Luasan masing-masing zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare	19
Tabel 3-2 Lokasi titik koordinat zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare	20
Tabel 3-3 Luasan ekosistem penting di masing-masing zona (Dhannahisvara & Pingkan, 2019)	21
Tabel 3-4 Target konservasi, ancaman dan indikator monitoring untuk masing-masing zona sesuai dengan potensi dan daya dukung ekosistemnya.....	28
Tabel 3-5 Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di setiap zona	32
Tabel 4-1 Rencana Kerja Jangka Panjang (20 tahun)	40
Tabel 4-2 Program Kerja Jangka Menengah (5 tahun)	45
Tabel 4-3 Rencana Kerja Jangka Pendek (1 tahun)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta dengan titik-titik koordinat Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan	4
Gambar 2-2 Peta pemanfaatan wilayah saat ini (<i>existing</i>) di Perairan Pulau Mare.....	6
Gambar 2-3 Pola pasang surut perairan Kota Tidore Kepulauan selama satu siklus harian (DKP Maluku Utara, 2011)	8
Gambar 2-4 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat pasang menuju surut di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan	9
Gambar 2-5 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat surut menuju pasang di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan	9
Gambar 2-6 Peta arah dan kecepatan arus laut musim timur pasang menuju surut di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan	10
Gambar 2-7 Peta arah dan kecepatan arus laut musim timur surut menuju pasang di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan	10
Gambar 2-8 Peta lokasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun di Pulau Mare.....	11
Gambar 2-9 Persentase tutupan karang keras di beberapa lokasi survei di perairan Pulau Mare (Muttaqin <i>et al.</i> , 2017)	12
Gambar 3-1 Peta zonasi kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Mare.....	19
Gambar 3-2 Peta zonasi dan titik koordinat zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare	20
Gambar 3-3 Peta zona inti di TWP Pulau Mare	23
Gambar 3-4 Peta zona pemanfaatan (Sub Zona Pariwisata Alam Perairan) di TWP Pulau Mare.....	24

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun dalam rangka menyediakan panduan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan dokumen ini, banyak pihak yang mendukung dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Gubernur Maluku Utara
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
4. USAID *Sustainable Ecosystem Advanced (USAID-SEA Project)* atas dukungan pengembangan kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara.
5. Kelompok Kerja (POKJA) Inisiasi Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Koservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP/KKP3K) Propinsi Maluku Utara.
6. *Wildlife Conservation Society - Indonesia Program (WCS-IP)* atas fasilitasi dan pendampingan selama proses pengembangan KKP TWP Pulau Mare.
7. Tim Penyusun dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan selama proses pengembangan KKP Pulau Mare dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasinya.

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP Pulau Mare ini akan digunakan sebagai pedoman dalam implementasi program pengelolaan kawasan konservasi semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam Pulau Mare dan perairan sekitarnya.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kawasan Konservasi Perairan TWP Pulau Mare

Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendukung pencapaian target nasional untuk kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha pada tahun 2020. Dukungan tersebut diterjemahkan melalui pencadangan beberapa kawasan konservasi, termasuk salah satunya adalah Pulau Mare di Kota Tidore Kepulauan.

Pulau Mare memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang cukup baik. Ditemukan tiga ekosistem pesisir penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sedikitnya 60 genus karang dengan luasan terumbu mencapai 168,27 ha (Dhannahisvara & Pingkan, 2019) dan 264 jenis ikan karang dari 110 genus (Muttaqin *et al.*, 2017) dapat ditemukan di perairan Pulau Mare. Lima jenis mangrove tersebar di sebelah Selatan Pulau Mare (Akbar *et al.*, 2016) dengan luas 25,24 ha (termasuk mangrove pesisir dan daratan) (Dhannahisvara & Pingkan, 2019). Padang lamun dengan luasan 9,68 ha juga merupakan salah satu habitat penting yang dapat ditemukan di pesisir Pulau Mare. Salah satu spesies kharismatik yaitu lumba-lumba (famili: *Delphinidae*), sering kali dijumpai di lokasi bernama Kahiya Masolo – suatu tempat yang diyakini oleh masyarakat di Pulau Mare sebagai tempat istirahat lumba-lumba. Kahiya Masolo menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa dikembangkan di Pulau Mare. Namun selain potensi sumber daya yang cukup tinggi, perairan Pulau Mare juga rentan terhadap kegiatan manusia, seperti penggunaan bom dan bus untuk menangkap ikan, penggunaan *kalase*, serta penebangan pohon mangrove. Aktivitas ini bila tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan ekosistem penting yang berakibat terganggunya habitat dan sumber daya.

Potensi ini perlu dikelola dengan baik demi menjamin keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat sehingga ancaman dapat ditekan bahkan dihilangkan. Pendekatan konservasi dipilih untuk dapat melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Pendekatan konservasi ini perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang dapat memandu implementasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Mare seluas 2.810 ha melalui Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 72.2 tahun 2012 dengan tipe kawasan Suaka Pulau Kecil (SPK). Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan yang signifikan terutama mengenai kewenangan pengelolaan perairan. sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan konservasi diserahkan ke Provinsi. Oleh karena itu, melalui berita acara serah terima sarana prasarana dan dokumen pencadangan kawasan konservasi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 13/BA/01.2/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Walikota Tidore Kepulauan menyerahkan pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Mare kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan berita acara tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi sekaligus survei untuk penyusunan RPZ kawasan konservasi Pulau Mare pada tahun 2017. Pelaksana kegiatan penyusunan RPZ terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan, Universitas Khairun, serta Kelompok Kerja (Pokja) Inisiasi Pembentukan dan Perencanaan Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Nomor 523/192.b/DKP. Selanjutnya, proses penyusunan RPZ kawasan konservasi Pulau Mare dilakukan melalui Konsultasi Publik pertama dan Konsultasi Publik kedua di Kota Tidore Kepulauan serta rapat Pokja di tingkat Provinsi di Ternate.

Pada tahun 2018¹ Provinsi Maluku Utara menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Di dalam pasal 21 disebutkan bahwa luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Mare dialokasikan menjadi sebesar 7.092,60 ha. Dengan demikian terdapat penambahan luasan kawasan sebesar 4,282.56 ha atau 38,62 %. Setelah dilakukan penentuan tipe kawasan KKP3K Pulau Mare berdasarkan hasil analisis kriteria diperoleh rekomendasi utamanya adalah Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Mare dengan nilai skor 2.518,52. Namun dikarenakan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018–2038. Peraturan ini mengalokasikan sekitar 1,1 juta Hektare untuk kawasan konservasi baik kawasan konservasi perairan (KKP) maupun kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K)

pengelolaan kawasan konservasi Pulau Mare hanya berupa perairan saja dan tidak melingkupi wilayah pularunya, maka penilaian tipe kawasan ditinjau kembali. Hasil peninjauan kembali tipe kawasan KKP/KKP3K, Pulau Mare direkomendasikan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) dengan nilai skor 3.240,00. Tabel hasil analisis kriteria KKP/KKP3K Pulau Mare dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi

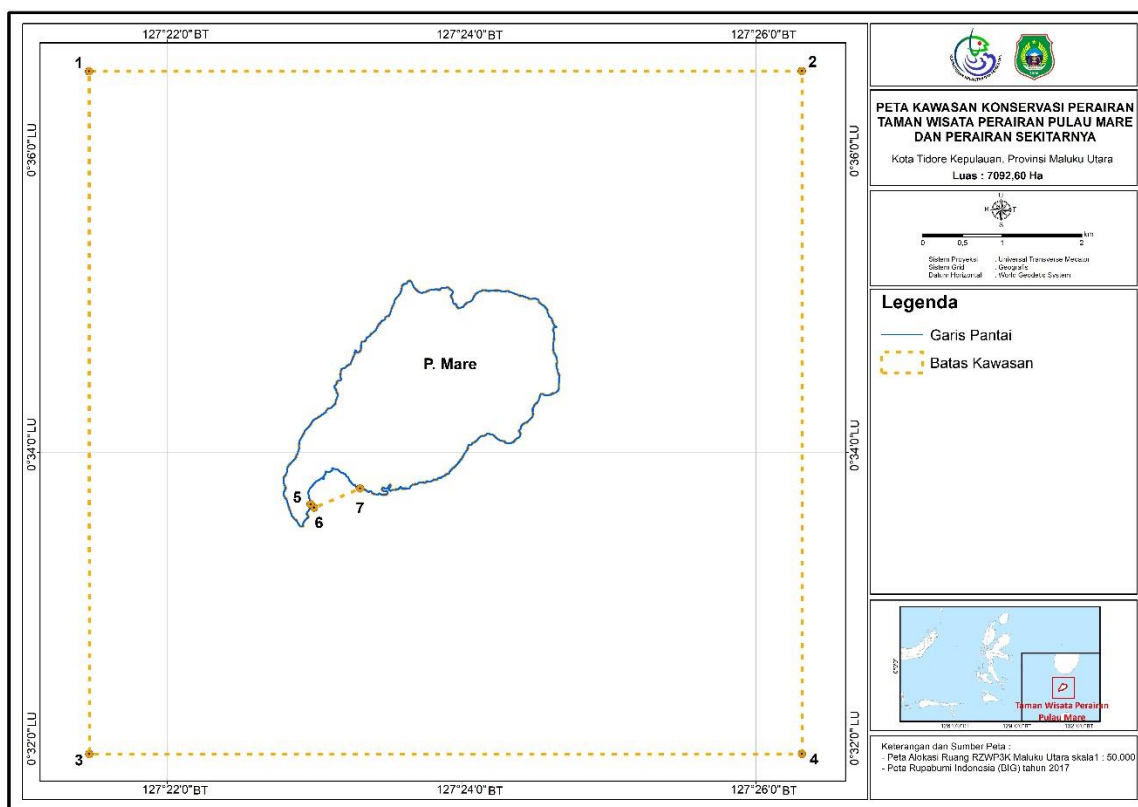
Tujuan dari Rencana Pengelolaan dan Zonasi ini adalah menyediakan informasi dan panduan untuk mengelola TWP Pulau Mare melalui penataan zonasi dan penerapan strategi pengelolaan yang baik untuk dapat menjamin keberlangsungan sumber daya perairan dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup dokumen rencana pengelolaan meliputi penataan zonasi kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) seluas 7.092,60 ha yang tertuang dalam peta kawasan skala 1:25.000 dan sudah dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku disertai dengan titik-titik koordinat terkait. Dokumen ini juga mengatur peruntukan setiap zona serta kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta tujuan dan strategi pengelolaannya. Rencana pengelolaan ini juga meliputi rencana kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai bentuk implementasi dari strategi pengelolaan.

2 POTENSI, PERMASALAHAN DAN TARGET KONSERVASI KAWASAN

2.1 Profil Umum Kawasan

Pulau Mare yang terletak pada posisi $0^{\circ}33' - 0^{\circ}35'$ LU dan $127^{\circ}22' - 127^{\circ}24'$ BT merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pulau Mare berbatasan dengan Pulau Moti di bagian Selatan, Pulau Tidore di bagian Utara, Selat Halmahera di bagian Timur dan Laut Maluku di bagian Barat. Pulau Mare memiliki dua desa, yaitu Desa Maregam dan Desa Marekofo. TWP Pulau Mare dengan luasan 7.092,60 ha memiliki batas-batas kawasan konservasi seperti yang tertera dalam Gambar 2-1 dan Tabel 2-1.



Gambar 2-1 Peta dengan titik-titik koordinat Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan

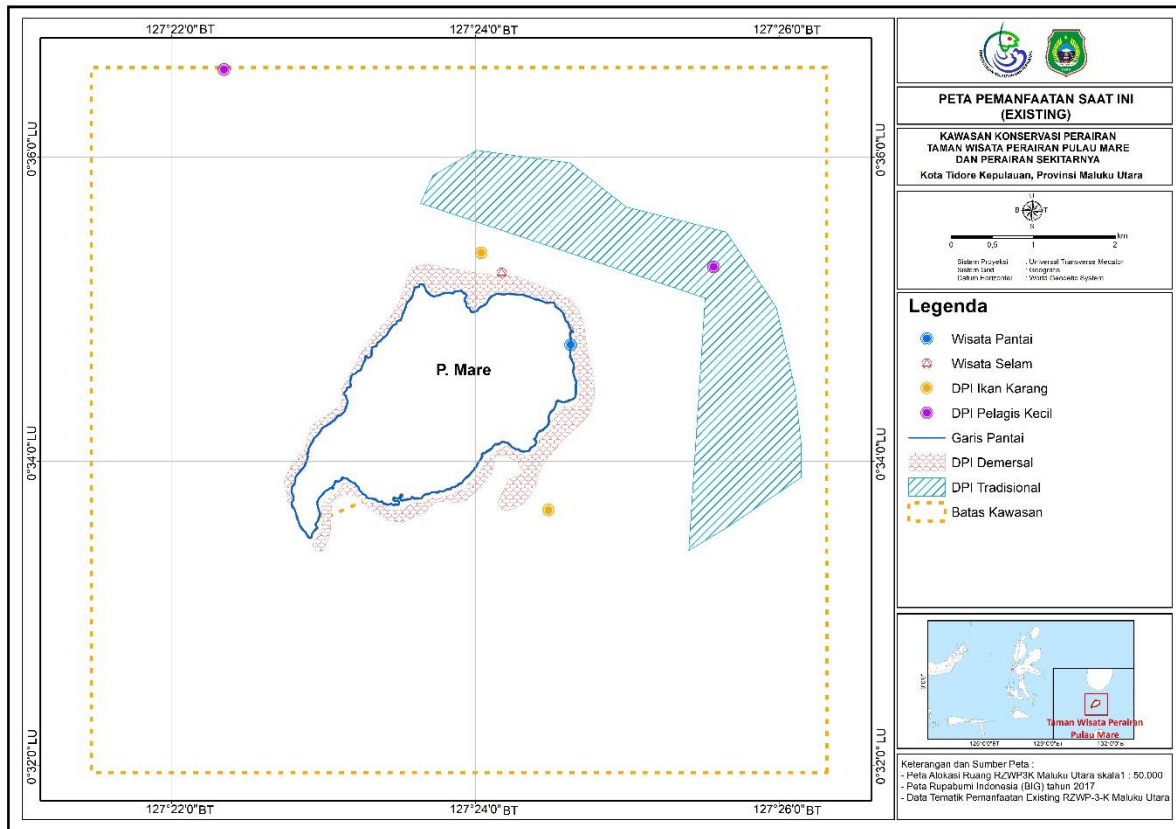
Tabel 2-1 Titik-titik koordinat Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare

Kode Titik Koordinat	Koordinat	
	Lintang Utara	Bujur Timur
1	0°36' 35.39"	127°21' 28.13"
2	0°36' 35.48"	127°26' 18.79"
3	0°31' 56.93"	127°21' 28.21"
4	0°31' 57.01"	127°26' 18.86"
5	0° 33' 38,91"	127° 22' 58,51"
6	0° 33' 37,44"	127° 22' 59,88"
7	0° 33' 45,26"	127° 23' 18,64"

Posisi Pulau Mare berdekatan dengan Pulau Tidore dan Pulau Ternate yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Maluku Utara. Pulau Mare dapat dengan mudah diakses menggunakan transportasi laut melalui pelabuhan *speed boat* Pasar Sari Malaha, Pelabuhan Rakyat Tomalou dan tambatan perahu di Gurabati. Pulau Mare sendiri telah memiliki sarana pelabuhan yang terletak di masing-masing desa. Akses dari masing-masing pelabuhan desa menuju kawasan konservasi yang dicadangkan dapat ditempuh dengan melakukan perjalanan darat (berjalan kaki) dan menggunakan perahu.

Pulau Mare dihuni oleh 965 jiwa yang tersebar di dua desa, yaitu Desa Maregam berjumlah 453 jiwa dan Desa Marekofo berjumlah 512 jiwa (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2019). Penduduk di Desa Maregam sebagian besar bermata pencaharian membuat kerajinan tembikar (*gerabah*) dari tanah liat, nelayan, dan sebagian kecil sebagai petani. Sedangkan Desa Marekofo sebagian besar masyarakatnya mengandalkan perikanan dan pertanian sebagai mata pencaharian (Lestari, 2017).

Kegiatan pemanfaatan laut yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini (*existing*) di wilayah sekitar perairan Pulau Mare adalah wisata bahari dan wisata pantai, selain itu juga terdapat wilayah pemanfaatan untuk perikanan demersal, perikanan pelagis kecil, perikanan tradisional dan perikanan karang di sekitar perairan Pulau Mare (Gambar 2-2).



Gambar 2-2 Peta pemanfaatan wilayah saat ini (*existing*) di Perairan Pulau Mare

2.2 Informasi Lingkungan Fisik

2.2.1 Iklim

Iklim di Pulau Mare adalah tropis lembab, yang banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim laut di sekitar Maluku Utara seperti Laut Halmahera dan Laut Maluku. Wilayah Maluku Utara menjadi daerah sebaran badai yang berkembang di sekitar wilayah Maluku Utara. Jenis badai yang terjadi di sekitar Maluku Utara adalah Siklon Tropis Maria, yang berpusat di Timur laut Pulau Halmahera (Laut Pasifik). Badai ini mengakibatkan tiupan angin disertai curah hujan sedang dan bangkitan gelombang permukaan laut yang tinggi. Intensitas pergerakan badai ini bergantung pada intensitas bangkitannya serta perubahan tekanan permukaan di wilayah Maluku Utara. Semakin rendah tekanan permukaan menyebabkan intensitas pergerakan badai menuju wilayah Maluku Utara membesar. Umumnya tekanan rendah di Maluku Utara terjadi saat matahari di sekitar ekuator (April dan Oktober). Musim hujan biasanya terjadi di bulan Mei–Oktober, sedangkan musim kemarau terjadi pada Desember – Maret, diselingi dengan musim pancaroba pada bulan April dan Desember (Bappeda Kota Tidore Kepulauan, 2010).

2.2.2 Geologi

Serupa dengan pulau-pulau yang melintang dari Utara ke Selatan seperti Pulau Hiri, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti dan Pulau Makian, Pulau Mare merupakan bagian dari busur kepulauan gunung api kuartar. Deretan pulau-pulau ini sebagian besar berbentuk kerucut gunung api yang masih aktif, seperti Gunung Ternate, Gunung Tidore dan Gunung Makian. Di Maluku Utara terdapat 17 formasi batuan dengan kisaran umur mulai dari sebelum era Kapur sampai dengan era Holosen (Bessho, 1944).

Batuan Pulau Tidore didominasi oleh batuan gunung api Holosen, yang terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa, dan abu gunung api. Breksi gunung api tersusun dari andesit piroksen, dengan warna kelabu tua, bentuknya kompak dengan masa dasar tufa berbutir kasar. Lava tersusun dari andesit sampai basal, dengan warna kelabu sampai kelabu kehitaman, bentuknya pejal dan sebagian berongga. Sedangkan tufa berwarna putih kotor dan kelabu, getas, bentuknya berbutir sedang sampai kasar. Untuk abu gunung api berwarna kelabu, berlapis baik dengan tebal 15 - 40 cm. Gunung api yang masih aktif adalah Gunung Ternate (Gamalama-Kieraha), Gunung Kiematabu (Pulau Tidore) dan Gunung Makian (Bappeda Kota Tidore Kepulauan, 2010).

2.2.3 Topografi

Secara umum topografi Kota Tidore Kepulauan termasuk Pulau Mare didominasi oleh perbukitan tektonik yang memiliki kemiringan lahan bervariasi mulai dari landai sampai curam. Sekitar 46,5% lahan masuk dalam kategori curam karena memiliki kemiringan lebih dari 15° (Iqra *et al.*, 2012). Luasan wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang bervariasi dapat dilihat pada Tabel 2-2.

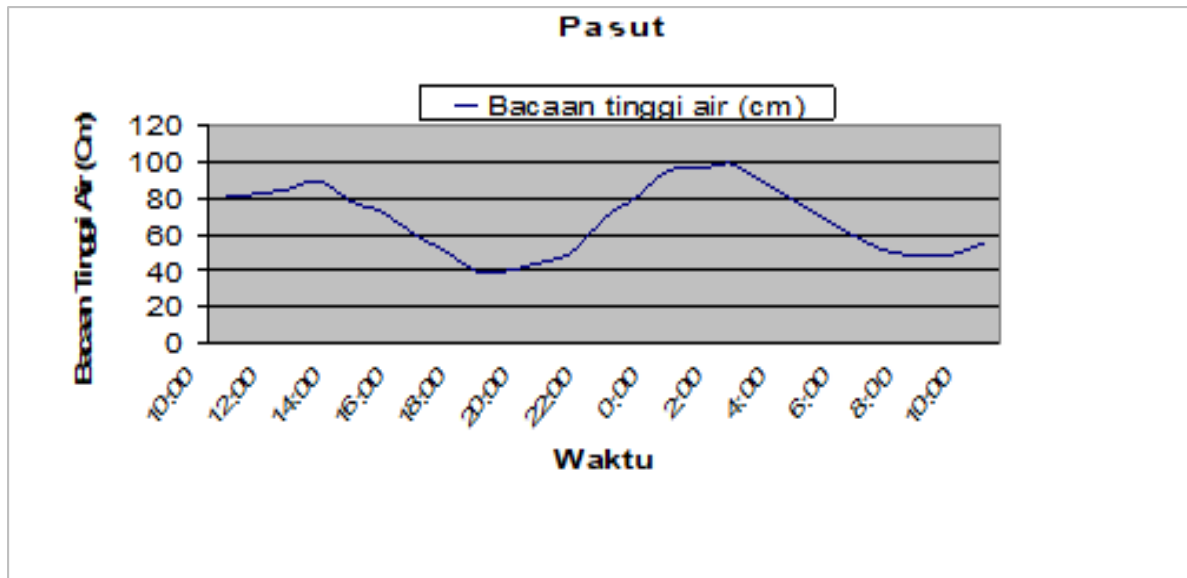
Tabel 2-2 Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kota Tidore Kepulauan

Kemiringan Lereng	Luas (km ²)	Persentase luas (%)	Kelas
0-2	2.855,01	28,55	Datar
2-15	1.611,10	16,11	Landai
15-40	3.517,17	35,17	Agak Curam
>40	1.133,10	11,33	Sangat curam

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomer 837/XPTS/UM/11.1980

2.2.4 Pasang Surut Air Laut

Pola pasang surut perairan di sekitar Pulau Tidore umumnya campuran condong ke harian ganda, yaitu dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dengan ketinggian yang tidak sama (Lihat Gambar 2-3). Tinggi pasang surut berkisar antara 0.88 – 1.88 m (DKP Maluku Utara, 2011).

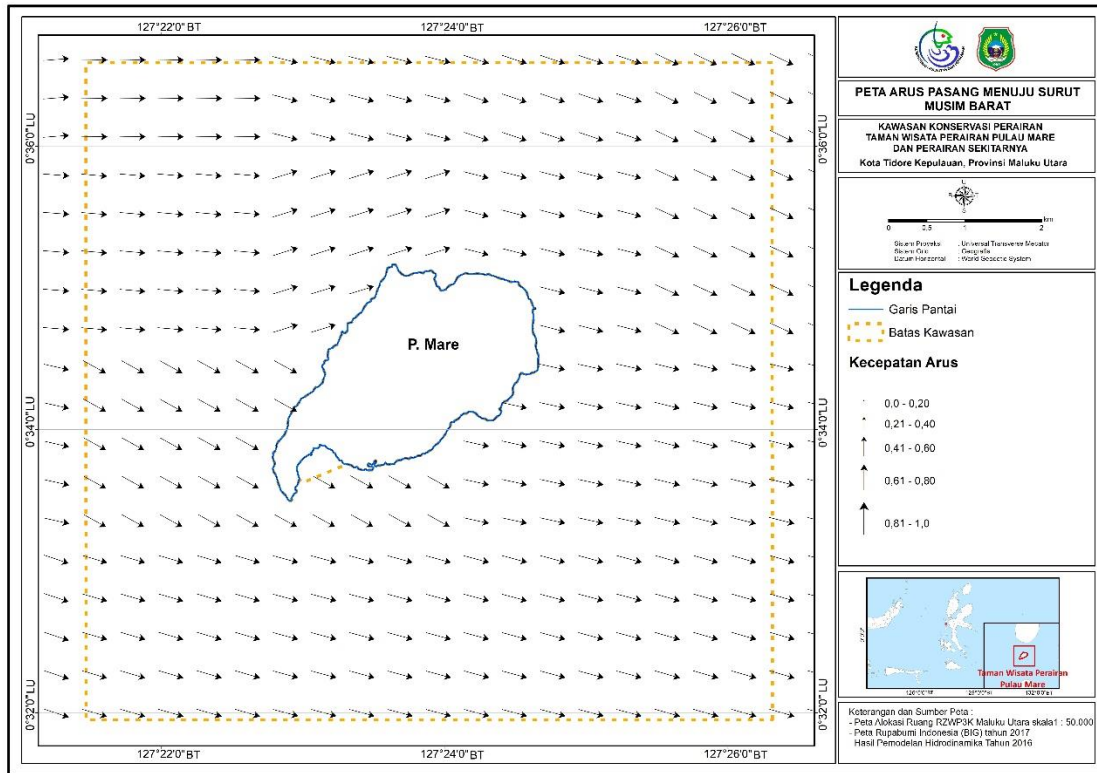


Gambar 2-3 Pola pasang surut perairan Kota Tidore Kepulauan selama satu siklus harian (DKP Maluku Utara, 2011)

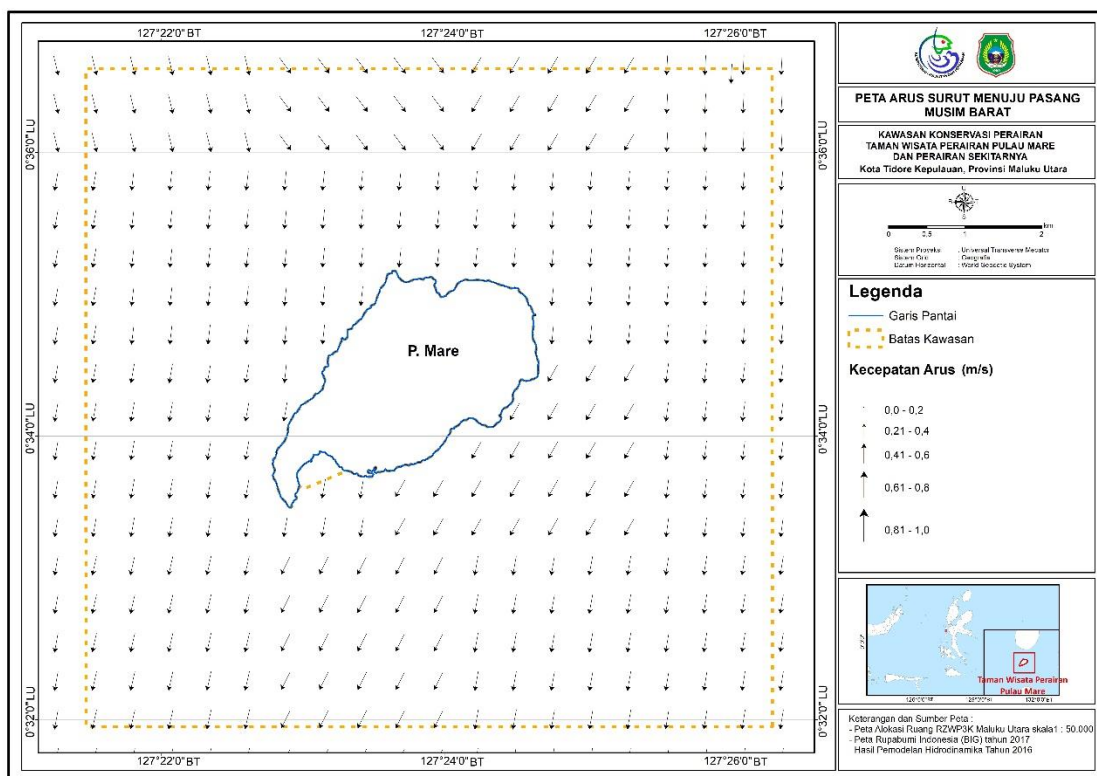
2.2.5 Parameter Air Laut

Suhu permukaan di perairan sekitar Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan adalah sekitar 30°C (DKP Maluku Utara, 2011). Nilai suhu tersebut berada pada rentang suhu perairan Indonesia yang tropis, yaitu berkisar antara 27°– 32°C. Rerata salinitas di perairan Pulau Mare adalah 30 permil, yang menunjukkan bahwa perairan Pulau Mare masih berada dalam kisaran normal. Derajat keasaman atau pH air laut di sekitar Pulau Mare berada pada kisaran 7 – 7,2 dengan kandungan oksigen terlarut sebesar 8,3 mg/L.

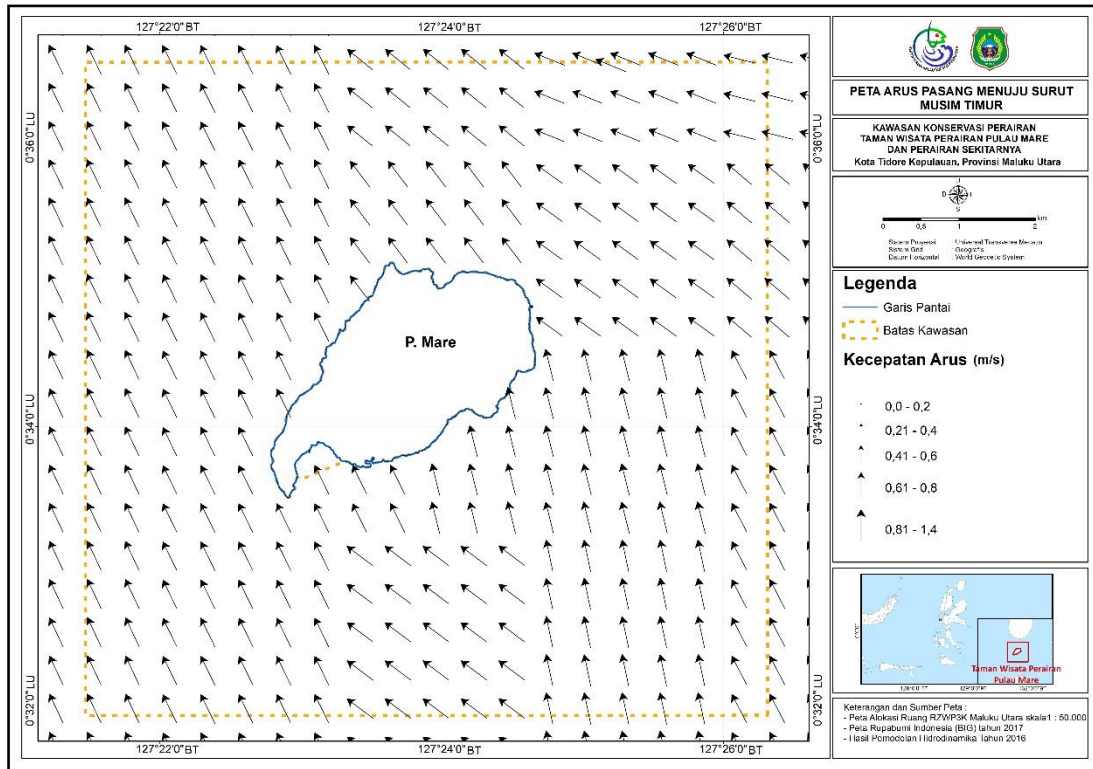
Arah arus pada perairan Kota Tidore Kepulauan pada musim barat pada saat pasang mendekati surut menunjukkan pola pergerakan menuju arah timur dengan kecepatan antara 0,1 – 0,6 m/detik (Gambar 2-4), sedangkan kecepatan pada saat surut mendekati pasang adalah 0,1 – 0,4 m/detik (Gambar 2-5). Arah arus pada musim timur pada saat pasang menuju surut adalah dari selatan menuju barat laut (Gambar 2-6) sedangkan pada saat surut menuju pasang ke arah utara (Gambar 2-7) dengan kecepatan antara 0,8 – 1,0 m/detik (Dhannahisvara & Pingkan, 2019).



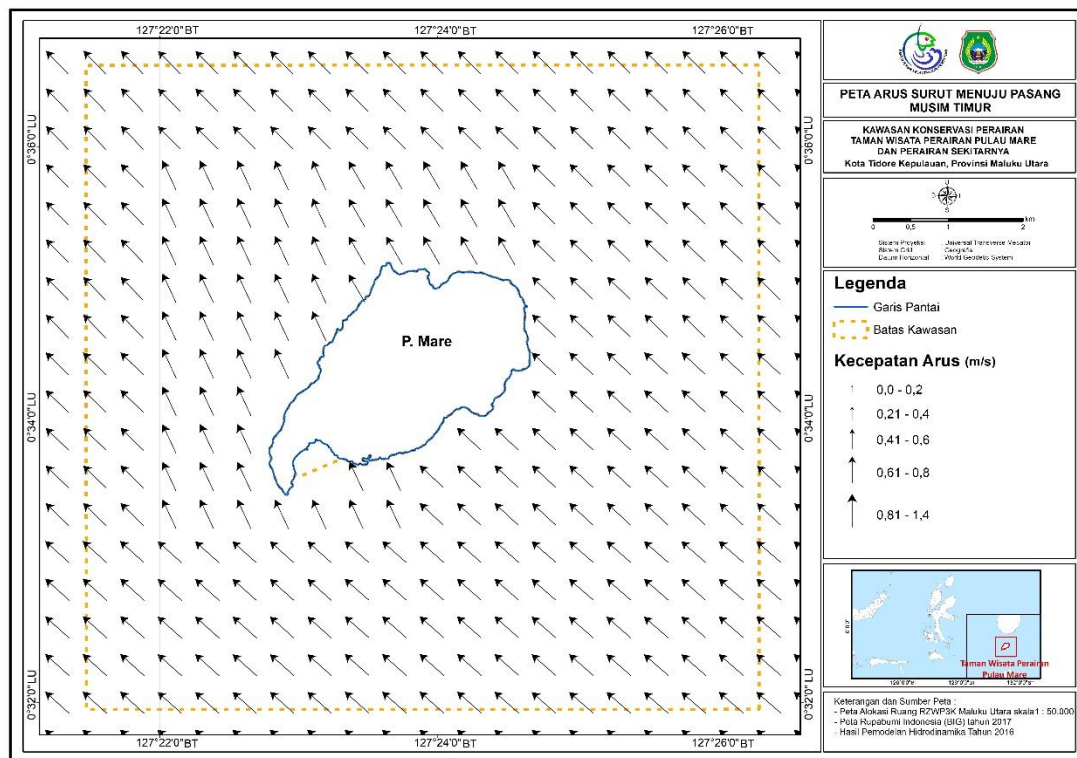
Gambar 2-4 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat pasang menuju surut di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan



Gambar 2-5 Peta arah dan kecepatan arus laut musim barat surut menuju pasang di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan



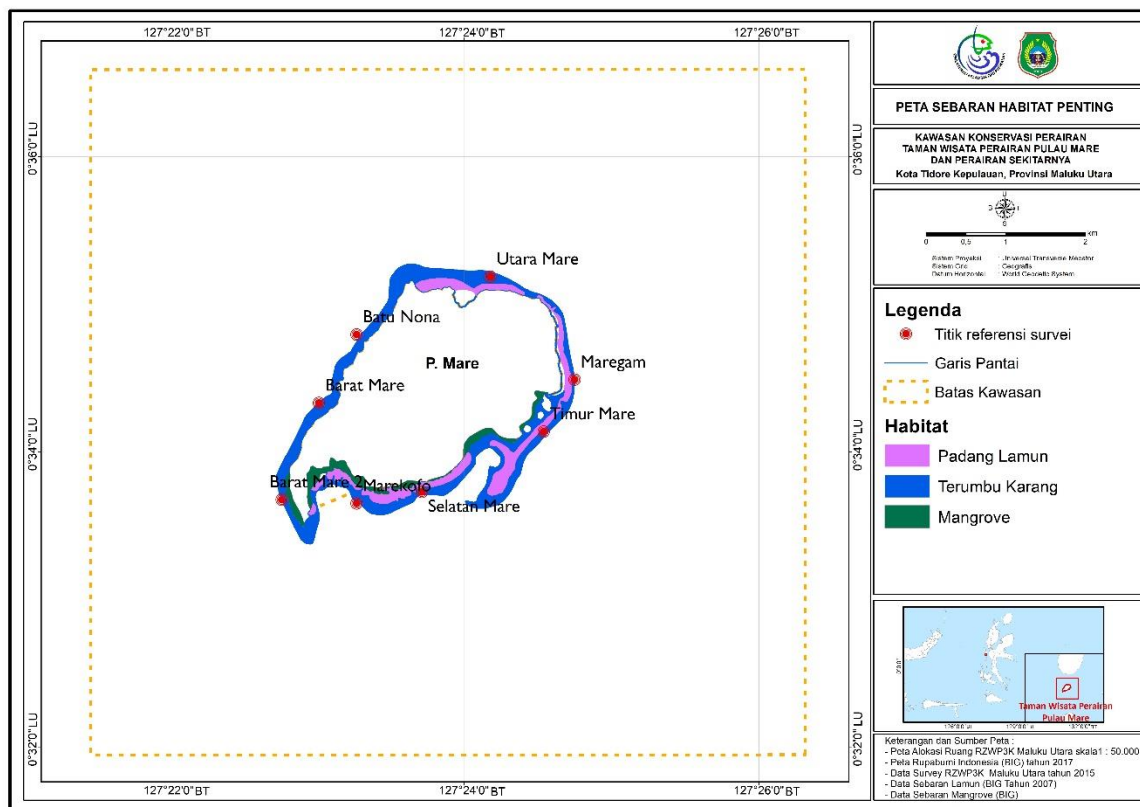
Gambar 2-6 Peta arah dan kecepatan arus laut musim timur pasang menuju surut di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan



Gambar 2-7 Peta arah dan kecepatan arus laut musim timur surut menuju pasang di wilayah KKPD Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan

2.3 Potensi Ekologis

TWP Pulau Mare memiliki tiga ekosistem penting yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam kehidupan pesisir dan laut, yaitu terumbu karang, mangrove dan lamun (Gambar 2-8). Tiga ekosistem ini berperan penting bagi ragam biota sebagai tempat bereproduksi, mencari makan, pembesaran dan juga tempat tinggal. Keberadaan ekosistem penting ini menjadi kekuatan dan potensi TWP Pulau Mare yang akan dikelola melalui pendekatan konservasi dengan penataan kawasan.



Gambar 2-8 Peta lokasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun di Pulau Mare

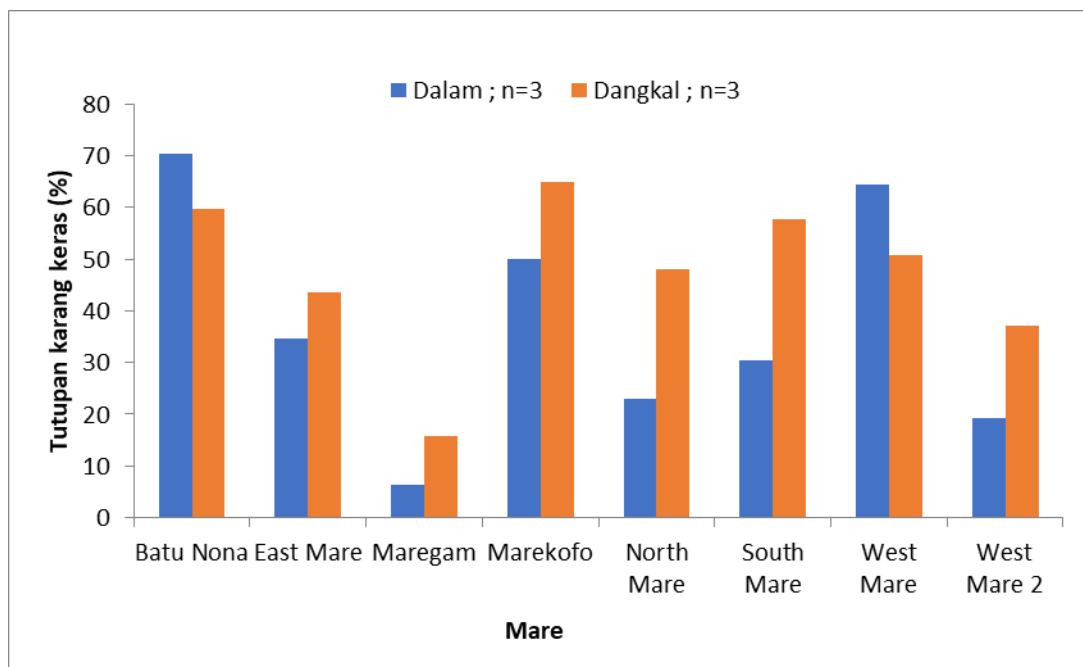
2.3.1 Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang dapat ditemui di sekeliling Pulau Mare dengan total luasan 168,27 ha. Menurut hasil kajian Muttaqin *et al.* (2017), komposisi terumbu di Pulau Mare terdiri dari karang keras, patahan karang, karang lunak, pasir, spon dan alga. Patahan karang (*rubble*) paling banyak ditemukan pada kedalaman 6-10 m dengan persentase sebesar 33%, sedangkan karang keras pada kedalaman <4 m memiliki persentase terbesar yaitu 47% dibandingkan dengan tutupan karang keras di perairan dalam. Banyaknya patahan karang dan

sedikitnya tutupan karang keras di kedalaman 6-10 m mengindikasikan adanya penggunaan bom dan sianida di perairan Pulau Mare.

Persentase tutupan karang keras di wilayah perairan Pulau Mare berkisar antara 6%-70%, yang menunjukkan terumbu karang dalam kondisi buruk sampai dengan cukup baik. Wilayah dengan persentase tutupan karang keras terendah adalah di depan Desa Maregam, sedangkan Batu Nona di wilayah Desa Marekofo memiliki persentase tutupan karang keras tertinggi sebesar 70% (Gambar 2-9).

Kondisi terumbu karang yang masih cukup baik ini menyediakan tempat untuk hidup berbagai jenis ikan karang yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi nelayan setempat dan masyarakat pesisir, selain itu dapat juga menjadi daya tarik wisatawan untuk menyelam melihat keindahan terumbu karang.



Gambar 2-9 Persentase tutupan karang keras di beberapa lokasi survei di perairan Pulau Mare (Muttaqin *et al.*, 2017)

2.3.2 Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove di Pulau Mare hanya terdapat di sebelah selatan pulau. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk pantai dari Pulau Mare yang sangat menentukan ketersediaan lahan bagi ekosistem mangrove (Akbar *et al.*, 2016). Wantase (2002) dalam Akbar *et al.*, (2016) menyatakan bahwa jenis pantai yang landai dapat menyediakan ruang yang luas untuk

mendukung pertumbuhan dan penyebaran berbagai macam jenis mangrove dibandingkan pantai yang terjal. Luas mangrove di wilayah Pulau Mare adalah 25,24 ha (Dhannahisvara & Pingkan, 2019) dengan ketebalan berkisar antara 85 dan 150 m (DKP Maluku Utara, 2011). Terdapat lima jenis dari tiga famili mangrove yang hidup di pesisir Pulau Mare, yaitu *Rhizophora stylosa*, *R. apicullata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Sonneratia alba* dan *Avicennia alba* (Akbar *et al.*, 2016). Namun hanya sebagian kecil dari mangrove yang hidup di wilayah pasang surut atau daerah pesisir.

Keberadaan ekosistem mangrove di pesisir Pulau Mare berperan dalam menyediakan tempat memijah, bertelur dan membesarkan anak untuk ikan-ikan pelagis kecil atau biota laut lainnya yang menjadi target masyarakat Pulau Mare. Selain berperan dalam menjaga pesisir pulau dari abrasi, ekosistem mangrove juga dapat menjadi salah satu tujuan wisata di Pulau Mare.

2.3.3 Padang Lamun

Ekosistem padang lamun di Pulau Mare seluas 9,68 ha hanya ditemukan di sebelah barat pulau, di sebelah selatan di depan Desa Marekoko dan sedikit di depan Desa Maregam di sebelah timur. Ada lima jenis lamun yang ditemukan di Pulau Mare yaitu *Cymodocea serrulata*, *C. rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Padang lamun berperan dalam menyediakan tempat untuk memijah, membesarkan anak dan mencari makan ikan-ikan dan biota laut lainnya. Potensi habitat penting ini dapat menunjang keberadaan ikan-ikan target yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Pulau Mare. Kerusakan padang lamun akan mempengaruhi siklus hidup beberapa jenis ikan dan biota yang bergantung kepada habitat padang lamun. Untuk itu pengelolaan ekosistem padang lamun yang baik sangat diperlukan untuk keberlanjutan sumber daya.

2.3.4 Satwa Laut Kharismatik

Wilayah perairan Pulau Mare juga merupakan habitat alami untuk lumba-lumba² (Famili: *Delphinidae*) dan hiu sirip hitam (*Carcharhinus melanopterus*). Kedua biota ini menarik bagi wisatawan dan juga memiliki fungsi ekologi yang penting. Hiu sirip hitam dapat ditemui di

² Belum dapat ditentukan jenisnya karena kurangnya data penelitian tentang jenis lumba-lumba yang ada di perairan Mare

daerah terumbu karang di sekeliling Pulau Mare (Muttaqin *et al.*, 2017), dan umumnya dijumpai dalam bentuk kelompok yang terdiri sampai lima individu.

Lumba-lumba di perairan Pulau Mare dapat ditemui di daerah yang dikenal dengan nama Kahiya Masolo. Di teluk kecil yang termasuk dalam wilayah Desa Maregam tersebut, masyarakat Pulau Mare percaya bahwa lumba-lumba masuk ke teluk itu untuk makan dan beristirahat. Lumba-lumba juga sering dijumpai di depan perairan Desa Maregam pada pagi dan sore hari. Namun data ekologi yang memadai tentang populasi dan jenis lumba-lumba di wilayah tersebut belum tersedia.

2.4 Potensi Sosial Budaya

Secara sosial dan budaya, masyarakat Pulau Mare tidak dapat dipisahkan dari Kesultanan Tidore karena pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kesultanan. Terdapat dua suku yang mendiami Pulau Mare, yaitu suku Tidore yang mendiami wilayah Desa Maregam dan suku Papua (Raja Ampat) yang mendiami wilayah Desa Marekofo. Keduanya menggunakan Bahasa Tidore dan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Salah satu tradisi yang masih terus dipertahankan sampai saat ini adalah pembuatan tembikar atau gerabah yang dilakukan oleh kaum wanita di Desa Maregam (Lestari, 2017). Secara adat kaum pria di Desa Maregam tidak diperkenankan untuk membuat tembikar. Pria hanya bertugas untuk menjual tembikar yang sudah jadi. Dalam proses pembuatan dan penjualan tembikar sudah ada pembagian peran antara pria dan wanita. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang ada, yaitu apabila pria membuat tembikar maka akan terkena bencana. Proses pembuatan tembikar dan peralatan yang dihasilkan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata budaya, sehingga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat di kawasan TWP Pulau Mare.

Masyarakat Mare terbiasa hidup komunal atau berkelompok serta mengenal sistem kelembagaan formal dan informal. Hal ini dapat menjadi kekuatan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pengawasan kawasan konservasi. Kekuatan lain yang dimiliki adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap para nelayan dan sesama warga desa, sehingga dapat menjadi modal dalam melakukan pengelolaan kawasan secara partisipatif (Lestari, 2017).

2.5 Potensi Ekonomi

Perairan Pulau Mare dan sekitarnya di Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu *fishing ground* atau daerah penangkapan bagi nelayan kakap dan kerapu. Nelayan tidak hanya dari Desa Maregam dan Marekofo, namun juga dari desa-desa di sekitar Pulau Mare. Tidak hanya dari perikanan karang, Pulau Mare juga memiliki potensi perikanan pelagis kecil dan pelagis besar. Kurang lebih 53% dari total hasil tangkapan di Kota Tidore Kepulauan didominasi oleh jenis ikan pelagis yaitu tuna dan tenggiri (*Scombridae*) (Retnoningtyas *et al.*, 2018). Pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap dari Kecamatan Tidore Selatan adalah sekitar 4.300 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 2,5 ton (BPS Tidore Kepulauan, 2019). Sedangkan hasil tangkapan maksimum per hari adalah 30 kg untuk jenis kakap merah, 6.000 kg untuk tuna, dan 9.020 kg untuk tongkol (Retnoningtyas *et al.*, 2018).

Sebagian besar penangkapan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang hanyut, tonda dan pancing ulur (Retnoningtyas *et al.*, 2018). Selain menggunakan tiga alat tersebut, sebagian nelayan di Desa Marekofo ada yang masih menggunakan alat tangkap jaring hela dasar atau biasa disebut kalase dalam bahasa lokal. Hasil tangkapan dari kalase adalah kembung, layang, madidihang, pisang-pisang dan tongkol (Lestari, 2017).

Selain potensi ekonomi melalui sektor perikanan, TWP Pulau Mare juga memiliki potensi dari sektor wisata bahari serta wisata sejarah dan budaya. Wisata menyelam, wisata melihat lumba-lumba dan juga wisata mangrove dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu mata pencaharian tambahan untuk masyarakat. Wisata sejarah dan budaya dapat dikembangkan sebagai penunjang wisata bahari melalui kerajinan tembikar dan sisa peninggalan sejarah di Pulau Mare. Potensi ekonomi lainnya adalah dari sektor pertanian dan perkebunan, dimana hampir semua masyarakat di Pulau Mare memiliki kebun cengkeh, kelapa dan pala.

2.6 Permasalahan Kawasan

a. Kelembagaan

Secara formal, sudah ada lembaga pengelola kawasan konservasi untuk Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam SK Gubernur Maluku Utara No. 45 tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang disebut Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP).

Namun UPTD ini belum dapat berjalan dengan optimal karena personil, prosedur tata kelola dan sarana perkantoran maupun sarana pengawasan kawasan yang belum memadai.

Selain itu secara administrasi TWP Pulau Mare berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, namun pengelolaan TWP Pulau Mare di bawah wewenang UPTD Balai KPSDKP. Hal ini dapat menimbulkan kendala, terutama dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan maupun implementasi program apabila tidak ada standar prosedur tata kelola dan kerjasama yang dapat mengatur hal ini.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Masalah yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam adalah praktek penangkapan ikan secara destruktif atau merusak, seperti penggunaan bom dan sianida. Praktek tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem karang dan bertambahnya jumlah patahan karang di beberapa lokasi TWP Pulau Mare. Selain itu, *kalase* atau jaring hela dasar hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat pulau Mare, meskipun terdapat PerMen KP nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengoperasian alat jaring ini dapat merusak karang karena menggunakan pemberat hingga ke dasar perairan dan mata jaring yang kecil sehingga jenis ikan yang ditangkap tidak selektif. Masyarakat masih menggunakan alat ini karena sudah menjadi tradisi yang digunakan secara turun menurun. Keberadaan hiu sirip hitam dan lumba-lumba di perairan Pulau Mare secara ekologi adalah sebagai pemangsa utama yang membantu mengontrol keseimbangan rantai makanan pada ekosistem laut. Penangkapan hiu sebagai target tangkapan untuk dijual siripnya maupun karena hasil tangkapan samping (*bycatch*) dari penggunaan *kalase* dapat memberikan dampak pada ekosistem terumbu karang dan populasi ikan target. Berkurangnya ikan pelagis kecil juga akan mengancam keberadaan lumba-lumba di perairan Pulau Mare yang bergantung pada ikan kecil untuk makanannya.

Ekosistem pesisir di TWP Pulau Mare juga terancam, karena masih maraknya praktek penambangan karang, penebangan mangrove dan penambangan pasir laut. Masyarakat Pulau Mare melakukannya untuk memenuhi keperluan bahan bangunan dan kayu bakar. Hal ini terjadi karena alternatif bahan bangunan dan bahan bakar lain masih sulit diakses

masyarakat karena harus ke Tidore atau Ternate. Kriteria yang dikeluarkan oleh Kepmen LH nomor 201 tahun 2004 juga menyatakan bahwa mangrove di pesisir Pulau Mare termasuk ke dalam kategori rusak. Mangrove di TWP Pulau Mare didominasi *Rhizophora apiculata* yang berbatang kecil yang menandakan eksploitasi terhadap jenis ini sedikit. Sedangkan kerapatan *Bruguiera gymnorhiza* relatif rendah, diduga karena morfologi pohon yang memiliki batang besar sehingga banyak dipilih untuk bahan bangunan (Akbar *et al.*, 2016).

Permasalahan lingkungan juga muncul karena sistem pengolahan limbah yang belum tersedia di sekitar TWP Pulau Mare. Akibatnya banyak sampah rumah tangga, sisa bahan bakar (oli dan bensin) dan sampah plastik yang dibuang ke laut. Tindakan ini mengancam estetika, kelestarian habitat pesisir, serta kesehatan masyarakat. Secara tidak langsung permasalahan sampah juga dapat mengganggu sektor pariwisata bahari, karena mengurangi minat wisatawan untuk datang ke TWP Pulau Mare.

2.7 Target Konservasi kawasan

Berdasarkan semua potensi dan permasalahan atau ancaman yang ada, dapat diidentifikasi habitat atau jenis biota yang dapat menjadi target konservasi. Untuk kawasan konservasi KKP TWP Pulau Mare target konservasi kawasan yang akan dilindungi, dimonitor dan dikelola agar dapat mencapai visi dan misi pengelolaan kawasan adalah:

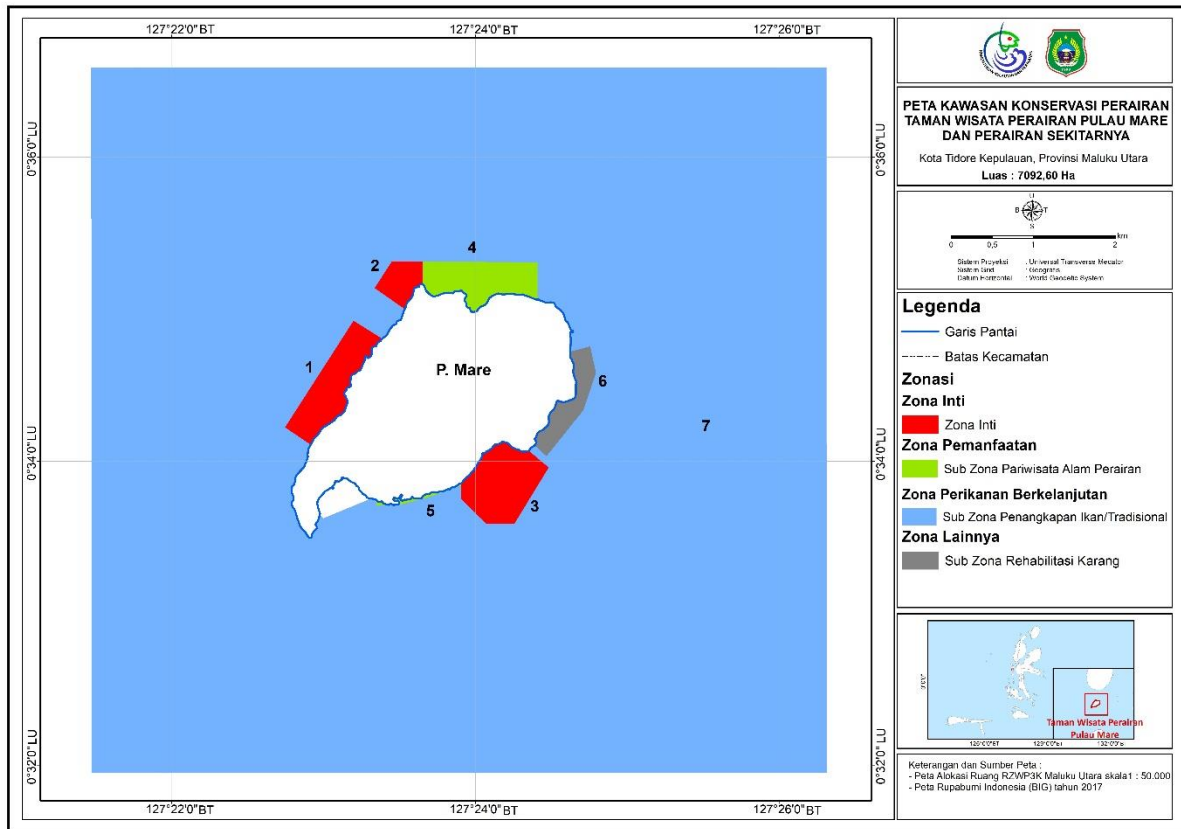
1. Terumbu karang
2. Padang Lamun
3. Mangrove (bagian pesisir yang masih terkena pasang surut)
4. Hiu sirip hitam (*black tip shark - Carcharhinus melanopterus*)
5. Lumba-lumba (Famili: *Delphinidae*)
6. Ikan karang
7. Ikan pelagis kecil (ikan target nelayan - Ikan Sorohi (Ikan Layang), Ikan Tongkol, Ikan Lolosi (Ikan Ekor Kuning).

3 PENATAAN ZONASI

3.1 Zonasi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Mare

Pada pengelolaan kawasan konservasi digunakan pendekatan berupa penataan ruang (zonasi), untuk mengalokasikan zona bagi kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMen KP) Nomor 30 Tahun 2010 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, zona-zona yang dapat didirikan pada sebuah KKP adalah (1) zona inti, (2) zona pemanfaatan, (3) zona perikanan berkelanjutan dan (4) zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Fungsi dari masing-masing zona dapat dilihat pada PerMen KP No. 30 Tahun 2010.

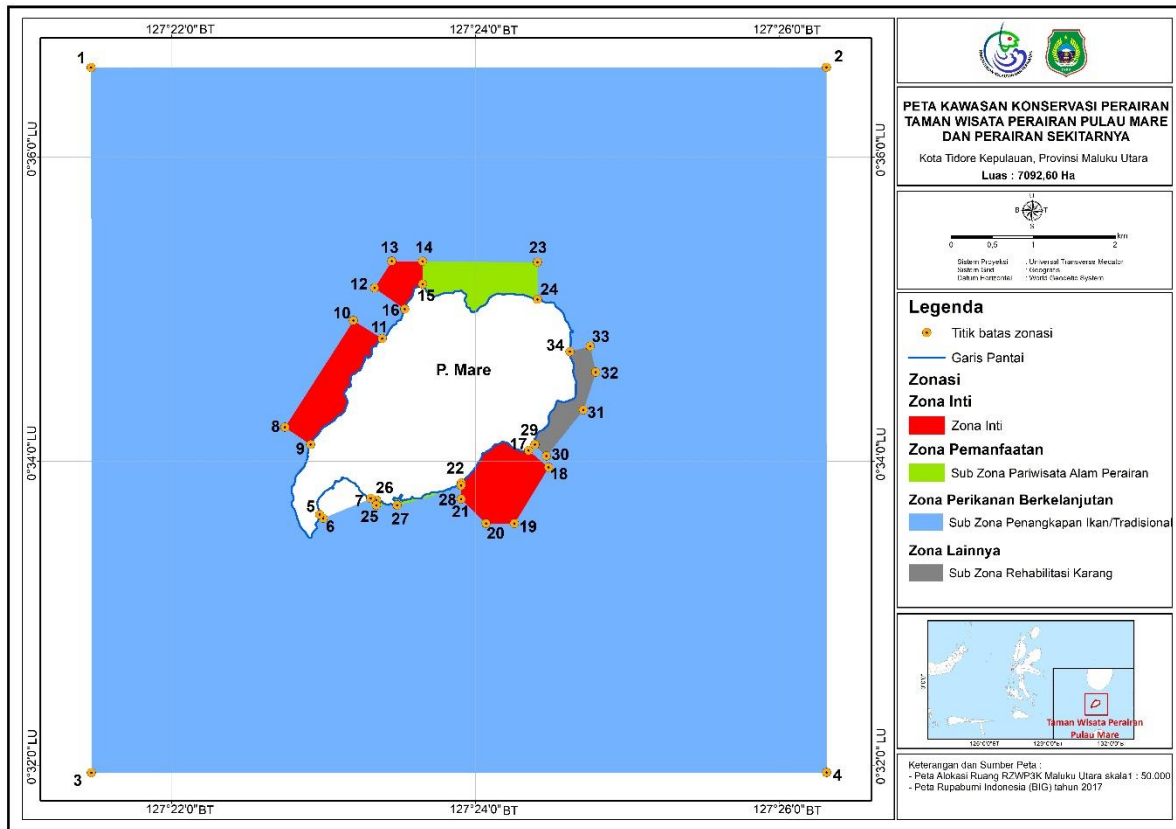
TWP Pulau Mare dengan luas 7.092,60 ha dibagi menjadi empat zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan (sub zona pariwisata alam perairan), zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya (lihat Gambar 3-1). Luas zona inti TWP Pulau Mare adalah 153,71 ha atau setara dengan 2,17% dari total luas kawasan sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada Pasal 9 PerMen KP 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Dari keseluruhan zona yang ada, luasan terbesar adalah zona perikanan berkelanjutan yaitu 96,34%, sedangkan luas zona pemanfaatan (sub zona pariwisata alam perairan) sebesar 0,89%. Adapun zona lainnya di TWP Pulau Mare ditetapkan sebagai sub zona rehabilitasi karang. Luasan masing-masing zona dapat dilihat pada Tabel 3-1 sedangkan titik koordinat masing-masing zona tercantum dalam Tabel 3-2. Untuk luasan masing-masing habitat penting di dalam zona tercantum dalam Tabel 3-3.



Gambar 3-1 Peta zonasi kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Mare

Tabel 3-1 Luasan masing-masing zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare

Zona		Kode	Luas (ha)	Luas Total (ha)	Persentase (%)
Inti		1	62,98	153,71	2,17
		2	21,81		
		3	68,92		
Pemanfaatan	Sub Zona Pariwisata Alam Perairan	4	59,76	62,97	0,89
		5	3,21		
Perikanan berkelanjutan	Sub zona penangkapan ikan/tradisional	7	6.842,47	6.842,47	96,47
Lainnya	Sub zona rehabilitasi karang	6	33,44	43,00	0,47
Total			7.092,60	7.092,60	100,00



Gambar 3-2 Peta zonasi dan titik koordinat zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare
 Keterangan: Angka menunjukkan kode titik koordinat untuk masing-masing zona sesuai yang tercantum pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Lokasi titik koordinat zona di Taman Wisata Perairan Pulau Mare

Zona	Kode	Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (ha)
			Lintang Utara	Bujur Timur	
Inti	1	8	0° 34' 13,40"	127° 22' 44,70"	62,98
		9	0° 34' 6,49"	127° 22' 54,89"	
		10	0° 34' 55,47"	127° 23' 11,82"	
		11	0° 34' 48,34"	127° 23' 23,17"	
	2	12	0° 35' 8,34"	127° 23' 20,11"	21,81
		13	0° 35' 18,97"	127° 23' 26,97"	
		16	0° 35' 0,03"	127° 23' 32,07"	
		14	0° 35' 18,88"	127° 23' 39,14"	
	3	15	0° 35' 9,88"	127° 23' 39,14"	68,92
		17	0° 34' 4,18"	127° 24' 21,03"	
		18	0° 33' 57,55"	127° 24' 28,98"	
		19	0° 33' 35,39"	127° 24' 15,46"	
		21	0° 33' 45,02"	127° 23' 54,44"	
		20	0° 33' 35,39"	127° 24' 4,25"	
		22	0° 33' 51,37"	127° 23' 54,46"	
		28	0° 33' 50,32"	127° 23' 54,44"	

Zona	Kode	Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (ha)
			Lintang Utara	Bujur Timur	
Pemanfaatan (sub zona Pariwisata alam perairan)	4	14	0° 35' 18,88"	127° 23' 39,14"	59,76
		15	0° 35' 9,88"	127° 23' 39,14"	
		23	0° 35' 18,54"	127° 24' 24,57"	
	5	24	0° 35' 3,82"	127° 24' 24,57"	3,21
		22	0° 33' 51,36"	127° 23' 54,46"	
		28	0° 33' 50,32"	127° 23' 54,44"	
		25	0° 33' 44,57"	127° 23' 20,93"	
		26	0° 33' 42,54"	127° 23' 20,85"	
		27	0° 33' 42,54"	127° 23' 29,10"	
Perikanan Berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional)	7	1	0° 36' 35,39"	127° 21' 28,13"	6.842,47
		2	0° 36' 35,47"	127° 26' 18,79"	
		3	0° 31' 56,93"	127° 21' 28,21"	
		4	0° 31' 57,01"	127° 26' 18,86"	
		5	0° 33' 38,91"	127° 22' 58,51"	
		6	0° 33' 37,41"	127° 22' 59,88"	
		7	0° 33' 45,26"	127° 23' 18,64"	
Lainnya (Sub zona Rehabilitasi karang)	8	29	0° 34' 6,50"	127° 24' 23,59"	33,44
		30	0° 34' 1,96"	127° 24' 28,07"	
		31	0° 34' 20,23"	127° 24' 42,70"	
		32	0° 34' 35,08"	127° 24' 47,60"	
		33	0° 34' 45,36"	127° 24' 45,39"	
		34	0° 34' 43,21"	127° 24' 37,38"	

Tabel 3-3 Luasan ekosistem penting di masing-masing zona (Dhannahisvara & Pingkan, 2019)

Zona	Ekosistem	Luas (ha)	Persentase (%)
Inti	Terumbu Karang	55,13	37,71
	Lamun	16,24	27,03
	Mangrove	1,69	5,15
Pemanfaatan (sub zona pariwisata alam perairan)	Terumbu Karang	19,56	13,38
	Lamun	15,99	21,10
	Mangrove	1,13	3,44
Lainnya (Sub Zona Rehabilitasi karang)	Terumbu Karang	14,03	9,60
	Lamun	10,07	16,76
	Mangrove	0,00	0,00
Perikanan Berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional)	Terumbu Karang	52,20	35,71
	Lamun	12,68	21,10
	Mangrove	0,10	0,31

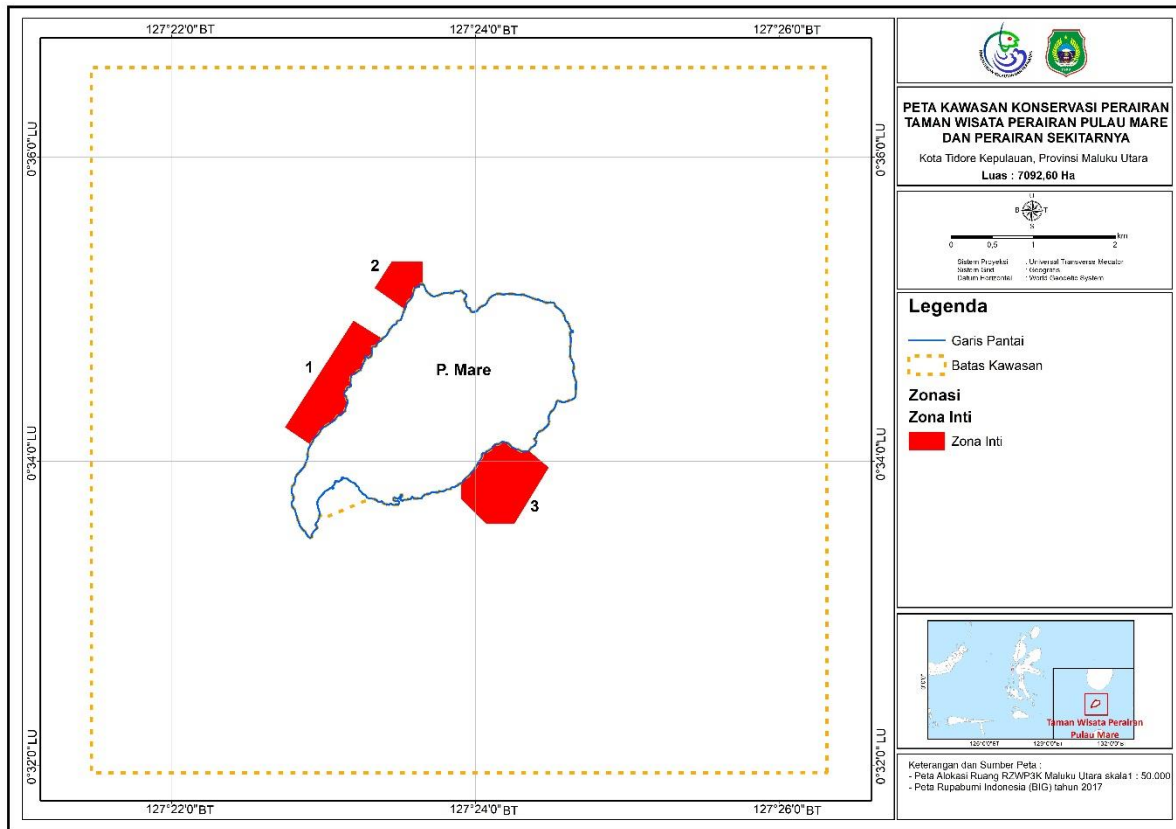
3.1.1 Zona Inti³

Tiga zona inti yang diusulkan dalam kawasan TWP Pulau Mare sudah memiliki kriteria yang ditentukan berdasarkan peraturan. Masing-masing zona inti memiliki keterwakilan dari tiga ekosistem penting, walaupun ketiganya tidak selalu ditemukan dalam satu zona yang sama (Gambar 3-3).

Zona inti nomor 1 dan nomor 2 merupakan daerah terumbu karang dan padang lamun yang memiliki kondisi masih cukup baik dan memiliki biomassa ikan karang yang cukup tinggi (600 - 700 kg/ha) (Muttaqin *et al.*, 2017). Zona inti ini terletak di wilayah administrasi Desa Marekofo. Selain kondisi tutupan karang keras yang tinggi, daerah ini juga menunjukkan tingkat pemulihan karang yang tinggi. Menjadikan wilayah ini sebagai zona inti di mana tidak ada tekanan dari kegiatan manusia, akan memberikan kesempatan terumbu karang untuk berkembang dan pulih secara alami. Pemulihan ini akan berdampak pada ketersediaan sumber daya ikan di masa depan.

Zona inti nomor 3 merupakan daerah terumbu karang yang berbentuk tapal kuda atau teluk kecil yang dikelilingi dengan mangrove. Walaupun persentase tutupan karang tidak terlalu tinggi, daerah ini menunjukkan proses pemulihan karang yang ditandai dengan nilai rekrutmen karang yang cukup tinggi (Muttaqin *et al.*, 2017). Daerah ini juga menjadi tempat lumba-lumba beristirahat dan mencari makan, sehingga perlu dilindungi untuk menjamin kelestariannya. Keberadaan lumba-lumba diperkirakan berkaitan dengan biomassa ikan di zona inti nomor 3, yang memiliki nilai paling tinggi (800 kg/ha) di antara wilayah lainnya di Pulau Mare (Muttaqin *et al.*, 2017).

³Sesuai dengan pasal 33 PerMen KP 17 tahun 2008, kriteria suatu wilayah untuk dapat ditentukan sebagai zona inti adalah merupakan tempat memijah, bertelur, membesarkan ataupun mencari makan biota perairan. Selain itu bisa juga merupakan salah satu ekosistem pulau-pulau kecil yang masih utuh dan tidak terganggu atau memiliki keunikan dan rentan terhadap perubahan.

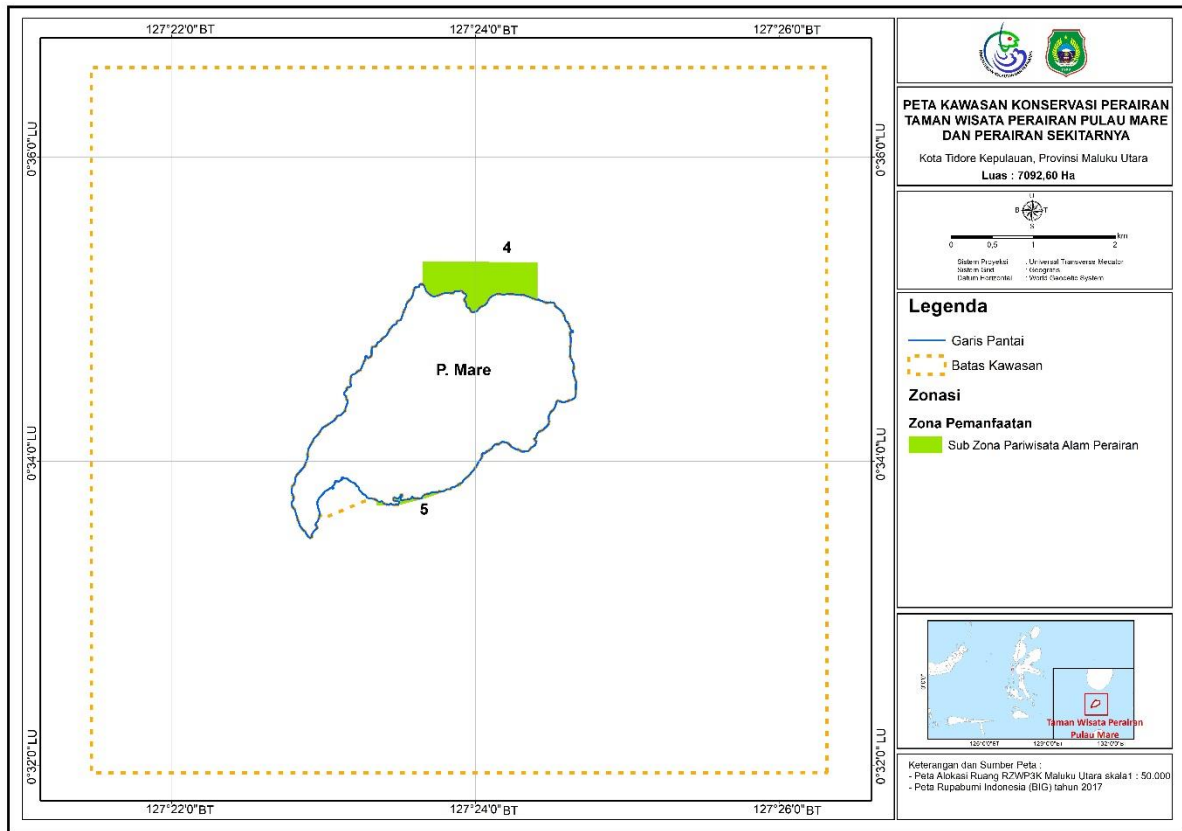


Gambar 3-3 Peta zona inti di TWP Pulau Mare

3.1.2 Zona Pemanfaatan (Sub Zona Pariwisata Alam Perairan)

Zona pemanfaatan (Sub Zona Pariwisata Alam Perairan) merupakan daerah yang memiliki daya tarik wisata, serta memiliki habitat penting yang dapat mendukung keberlangsungan sumber daya. Sub zona ini diperuntukkan sebagai lokasi pengembangan wisata bahari dan merupakan wilayah 'larang ambil' yang berarti melarang aktivitas perikanan (Gambar 3-4).

Kondisi ekologi pada Sub Zona Pariwisata Alam Perairan umumnya cenderung baik. Sub Zona Pariwisata Alam Perairan nomor 4 di sebelah utara memiliki persentase tutupan karang yang cukup baik, terutama di perairan dangkal dengan rekrutmen karang kategori sedang (Muttaqin *et al.*, 2017). Kelimpahan ikan dan biomasa ikan karang di lokasi ini juga dalam kategori sedang, sehingga berpotensi mendukung wisata selam dan snorkeling. Sub Zona Pariwisata Alam Perairan nomor 5 di sebelah selatan Pulau Mare memiliki daya tarik wisata budaya dan wisata selam. Wilayah mangrove di sub zona ini merupakan lokasi ritual adat masyarakat Mare. Lokasi sub zona nomor 5 juga memiliki tutupan terumbu karang yang cukup baik (lihat Gambar 3-5) dan dekat dengan Kahiya Masolo (zona inti 3) yang sering ditemui lumba-lumba.



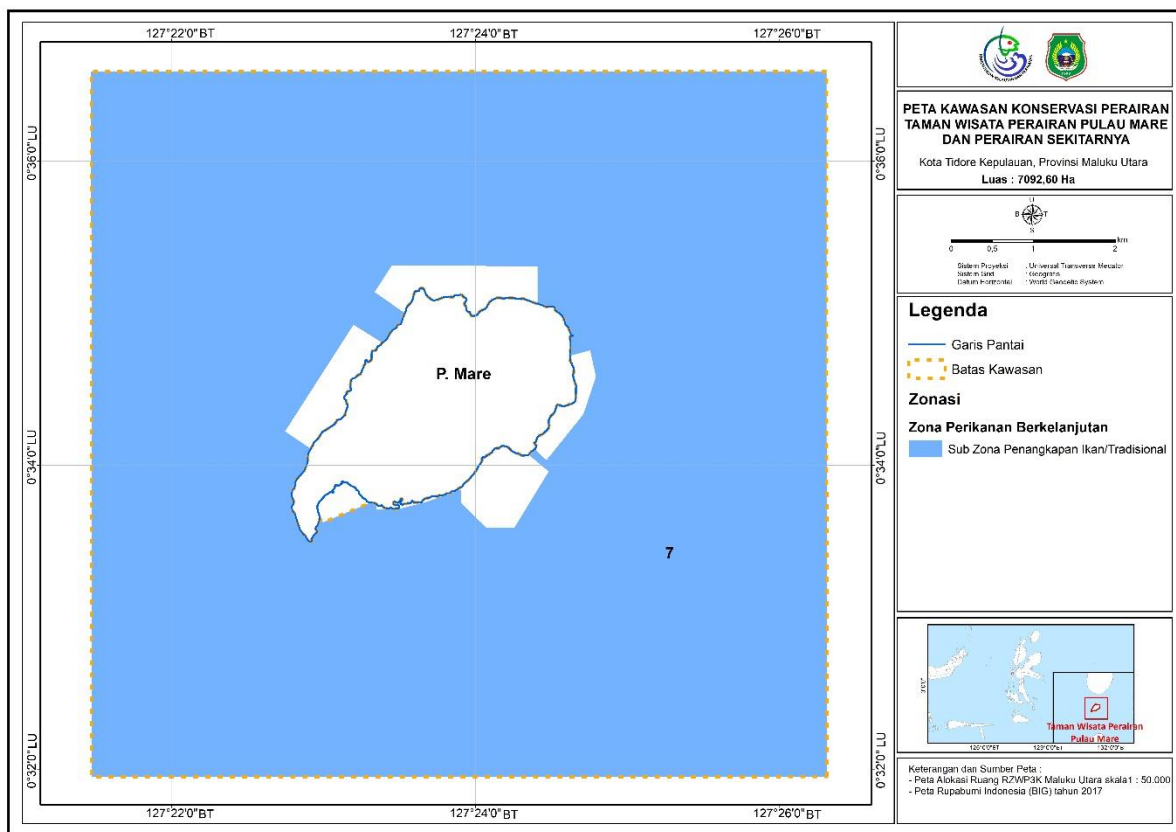
Gambar 3-4 Peta zona pemanfaatan (Sub Zona Pariwisata Alam Perairan) di TWP Pulau Mare



Gambar 3-5 Kondisi terumbu karang di zona pemanfaatan sub zona wisata 5 (Desa Marekofo) di perairan dangkal (Muttaqin *et al.*, 2017)

3.1.3 Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradsional) diperuntukan sebagai lokasi aktivitas perikanan bagi nelayan, dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan kapal penangkapan di bawah 10 GT, serta memperhatikan daya dukung dan kondisi lingkungan (Gambar 3-6). Zona perikanan berkelanjutan selain memiliki potensi sumber daya ikan juga harus memiliki nilai konservasi untuk menjamin keberlangsungan sumber daya. Zona perikanan berkelanjutan merupakan yang terluas (9.842,47 ha atau 96,47% dari keseluruhan luas kawasan), sehingga nelayan masih bisa leluasa mencari ikan di luar zona inti dan sub zona wisata.

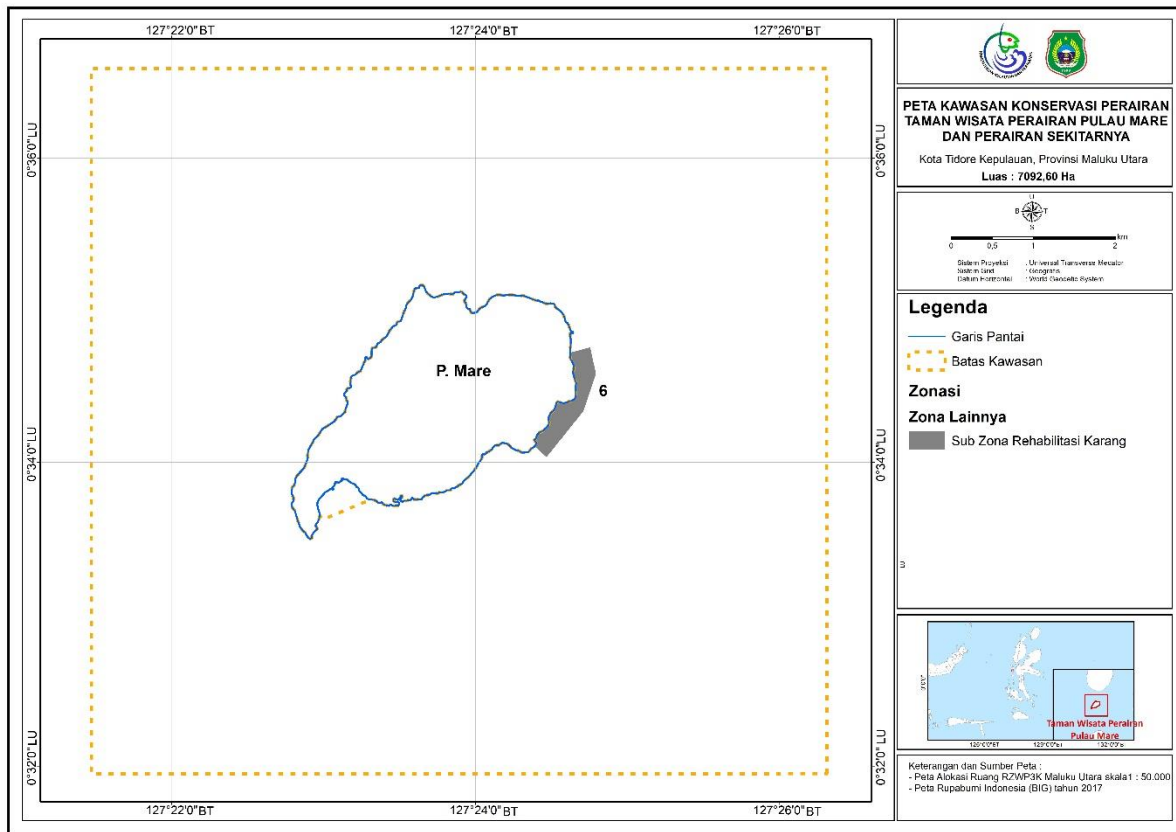


Gambar 3-6 Peta zona perikanan berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional) di TWP Pulau Mare

3.1.4 Zona Lainnya (Sub Zona Rehabilitasi Karang)

Zona lainnya (sub zona rehabilitasi karang) hanya berada di Desa Maregam di bagian timur Pulau Mare (Gambar 3-7). Kondisi terumbu karang yang rusak di kawasan ini menunjukkan pemulihan sehingga sesuai untuk sub zona rehabilitasi. Sub zona ini hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan penelitian. Sub zona rehabilitasi diusulkan

cukup luas (0,47% dari luas keseluruhan KKP), karena masyarakat dalam forum konsultasi publik menghendaki pemulihan terumbu karang di lokasi tersebut.



Gambar 3-7 Peta zona lainnya (sub zona rehabilitasi karang) di TWP Pulau Mare

3.2 Target Konservasi, Ancaman dan Indikator Monitoring di setiap Zona

Untuk mengelola KKP secara efektif dan berkeadilan, diperlukan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan tentang apa yang ingin dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Suatu ekosistem ataupun sumber daya yang ingin dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan disebut juga sebagai target konservasi. Keberadaan target konservasi harus dapat diidentifikasi untuk masing-masing zonasi agar bisa menjadi indikator pengelolaan kawasan. Target konservasi juga dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya alam.

Setiap habitat ataupun biota yang menjadi target konservasi umumnya memiliki kerentanan terhadap ancaman dari alam dan tekanan dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu populasi ataupun fungsi ekologisnya. Tekanan atau ancaman terhadap target konservasi pada umumnya memiliki kesamaan, misalnya ancaman bagi habitat terumbu karang dapat pula

menjadi ancaman bagi populasi ikan. Ancaman yang sama bisa menghasilkan dampak yang sama maupun berbeda pada masing-masing target konservasi. Ancaman ini yang harus dapat diantisipasi ataupun dicarikan solusinya melalui strategi pengelolaan yang sesuai. Indikator monitoring digunakan untuk bisa mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan dapat mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian target konservasi. Target konservasi untuk masing-masing zonasi secara detail beserta ancaman dan indikator monitoringnya dapat dilihat pada Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Target konservasi, ancaman dan indikator monitoring untuk masing-masing zona sesuai dengan potensi dan daya dukung ekosistemnya

Zona	Target konservasi	Ancaman	Indikator monitoring
Inti 1 dan Inti 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumbu karang 2. Hiu sirip hitam 3. Ikan Karang 	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan masuk ke zona inti dan membuang jangkar sembarangan • Penangkapan ikan ilegal di zona inti dengan menggunakan alat tangkap merusak seperti: Kalase/jaring tidak selektif; bom; potas/racun • Pengambilan batu karang untuk bangunan • Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah nelayan 2. Jumlah alat tangkap Kalase 3. Berkurangnya jumlah kejadian penggunaan bom dan potas 4. Persentase tutupan karang dan rekrutmen karang 5. Keberadaan sampah 6. kegiatan pengawasan 7. Kelimpahan dan biomassa kerapu dan kakap 8. Jumlah hasil tangkapan samping (<i>bycatch</i>) hiu sirip hitam
Inti 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumbu karang 2. Padang Lamun 3. Mangrove 4. Lumba-lumba 5. Hiu sirip hitam 6. Ikan karang 	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan masuk ke zona inti dan membuang jangkar sembarangan • Penangkapan ikan ilegal di zona inti dengan menggunakan alat tangkap merusak seperti: Kalase/jaring tidak selektif; bom; potas/racun • Pengambilan batu karang untuk bahan bangunan • Penambangan pasir pantai untuk bahan bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah nelayan 2. Jumlah alat tangkap Kalase 3. Jumlah laporan kejadian penggunaan alat tangkap yang merusak 4. Persentase tutupan karang dan rekrutmen karang 5. Keberadaan sampah 6. Kegiatan pengawasan

Zona	Target konservasi	Ancaman	Indikator monitoring
		<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan • Sampah 	7. Luasan mangrove dan persentase tutupan mangrove ⁴ 8. Kelimpahan dan biomass ikan karang 9. Jumlah kemunculan lumba-lumba 10. Jumlah hasil tangkapan samping (<i>bycatch</i>) hiu sirip hitam 11. Jumlah kemunculan hiu sirip hitam 12. Persentase kerapatan lamun
Pemanfaatan 4 (sub zona pariwisata)	1. Terumbu karang 2. Hiu sirip hitam 3. Ikan karang	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkar kapal wisata yang dibuang sembarangan • Pengunjung yang menginjak karang • Penangkapan ikan ilegal di Sub Zona Pariwisata Alam Perairan (zona larang ambil) • Limbah B3 (oli, bensin, solar) • Sampah • Penambangan karang sebagai souvenir 	1. Jumlah kapal wisata 2. Persentase tutupan karang 3. Jumlah pengunjung 4. Jumlah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 5. Jumlah laporan penggunaan alat tangkap yang merusak 6. Ketersediaan sarana dan prasarana wisata 7. Kegiatan pengawasan 8. Jumlah operator pariwisata yang menerapkan SOP pariwisata 9. Jumlah pedagang souvenir dari karang

⁴ Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam monitoring dan implementasi program terkait dengan mangrove

Zona	Target konservasi	Ancaman	Indikator monitoring
			10. Kelimpahan dan biomasa ikan karang 11. Jumlah kemunculan hiu sirip hitam
Pemanfaatan 5 (sub zona pariwisata)	1. Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Jangkar kapal wisata yang dibuang sembarangan Pengunjung yang menginjak karang Penangkapan ikan ilegal di sub zona wisata (zona larang ambil) dengan menggunakan alat tangkap merusak dan tidak selektif Sampah dan Limbah dari kapal (oli, bensin, solar) Penambangan karang sebagai souvenir Penebangan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan serta lahan wisata Tabrakan kapal dengan lumba-lumba 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kapal pariwisata Persentase tutupan karang Persentase tutupan mangrove Jumlah pengunjung Jumlah alat tangkap tidak ramah lingkungan Jumlah laporan kejadian penggunaan alat tangkap merusak Ketersediaan sarana dan prasarana wisata Jumlah pedagang souvenir dari karang Kelimpahan dan biomasa ikan karang Jumlah kemunculan hiu sirip hitam Jumlah kemunculan lumba-lumba
perikanan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Ikan Sorohi (Ikan Layang) Ikan Tongkol Ikan Lolosi (Ikan Ekor Kuning) 	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove, lamun) Penangkapan berlebih dengan alat tangkap yang tidak selektif Penangkapan dengan alat tangkap merusak 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase tutupan karang, lamun dan mangrove Produktivitas perikanan

Zona	Target konservasi	Ancaman	Indikator monitoring
Sub Zona Rehabilitasi 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumbu karang 2. Lamun 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkar yang dibuang sembarangan • Sampah • Penambangan pasir • Lalu lintas kapal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen karang 2. Persentase tutupan karang

3.3 Aturan di dalam Zona

Peruntukan masing-masing zona berbeda sehingga kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan diatur dan disesuaikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut. Semua kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona merujuk kepada PP 60/2007, PerMen KP 17/2008, dan PerMen KP 30/2010. Aktivitas pembangunan tidak diperkenankan apabila dilakukan di zona inti, sedangkan di zona lainnya diperlukan izin pemanfaatan serta kajian tentang daya dukung dan dampak lingkungan. Detail kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk setiap zona dapat dilihat pada Tabel 3-5.

Tabel 3-5 Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di setiap zona

No.	Kegiatan	Zona Inti	Zona Pemanfaatan (Sub zona Pariwisata alam perairan)	Zona Perikanan Berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional)	Zona Lainnya (Sub zona Rehabilitasi Karang)
A. Pendidikan, Penelitian dan Rehabilitasi					
1	Penelitian	Izin	√	√	√
2	Pendidikan	X	√	√	√
3	Pemantauan non ekstraktif	Izin	√	√	√
4	Pemantauan ekstraktif	X	Izin	√	√
5	Rehabilitasi terumbu karang	X	√	√	√
6	Transplantasi lamun	X	√	√	√
7	Rehabilitasi mangrove	X	√	√	√
B. Pemanfaatan sumber daya alam dan budidaya					
8	Penangkapan ikan				
	a. Kalase	X	X	X	X
	b. Pancing dasar	X	X	√	X
	b. Pancing ulur	X	X	√	X
	c. Panah	X	X	√	X
	d. Bagan tancap dan perahu	X	X	√	X
	e. Bom, bius	X	X	X	X
f. Rumpon	X	X	X	X	
9	Penangkapan ikan dengan dengan kapan maksimum 10 GT dan sudah terdaftar di DKP	X	X	√	X
10	Penambangan karang hidup atau mati	X	X	X	X
11	Penebangan mangrove	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Inti	Zona Pemanfaatan (Sub zona Pariwisata alam perairan)	Zona Perikanan Berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional)	Zona Lainnya (Sub zona Rehabilitasi Karang)
12	Penambangan pasir	X	X	X	X
13	Menangkap, mengambil, dan melukai biota yang dilindungi (penyu, lumba lumba, dan hiu)	X	X	X	X
14	Budidaya ramah lingkungan (semi intensif)				
	a. Rumput laut	X	X	√	X
	b. Kerapu	X	X	√	X
	c. Budidaya dengan Keramba jaring apung (KJA)	X	X	√	X
C. Pariwisata					
15	Wisata melihat spesies tertentu (Lumba lumba, Hiu paus, dll)	X	√	√	X
16	Aktivitas kapal wisata (<i>glass bottom boat</i> ; transportasi)	X	√	√	X
17	Menyelam menggunakan kompresor	X	X	X	X
18	Rekreasi pantai	X	√	√	X
19	Wisata selam	X	√	√	X
20	Wisata snorkeling	X	√	√	X
21	Wisata jet ski	X	√	√	X
22	Wisata mangrove	X	√	√	X
23	Wisata mancing	X	X	√	X
24	Wisata dayung (kayak)	X	√	√	X
25	Wisata selancar	X	√	√	X
26	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersil	X	izin	√	izin
27	Pembangunan infrastruktur wisata	X	izin	izin	X
28	Pembangunan sarana atau pos wisata	X	izin	izin	X
D. Pelayaran, pengelolaan dan pengawasan KKP					
29	Berlabuh untuk kapal kapasitas diatas 10 GT	X	√	√	X
30	Berlayar melintas untuk kapal berukuran dibawah atau sama dengan 10 GT	√	√	√	X
31	Membuang jangkar	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Inti	Zona Pemanfaatan (Sub zona Pariwisata alam perairan)	Zona Perikanan Berkelanjutan (sub zona penangkapan ikan/tradisional)	Zona Lainnya (Sub zona Rehabilitasi Karang)
32	Jalur pelayaran	X	√	√	X
33	Jalur transportasi kapal reguler masyarakat	X	√	√	√
34	Tambatan perahu (mooring bouy)	X	√	√	X
35	Patroli pengawasan	Izin	√	√	√
36	Membuang limbah budidaya ke perairan langsung	X	X	X	X
E. Pembangunan/ aktivitas lainnya					
37.	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	X	Izin	Izin	Izin
38.	Pembangunan tambat labuh kapal	X	Izin	Izin	X
39.	Penempatan instalasi di laut	X	Izin	Izin	X

4 RENCANA PENGELOLAAN

4.1 Unit Pengelola

Pengelolaan TWP Pulau Mare dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sebagai bagian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Unit pengelola ini tidak hanya mengelola TWP Pulau Mare tapi juga lima kawasan konservasi lainnya yang ada di Maluku Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP) ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2017. UPTD Balai KPSDKP akan melaksanakan semua kegiatan yang tercantum pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) ini, dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan berkeadilan.

4.2 Rencana Jangka Panjang

Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP TWP Pulau Mare merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi pengelolaan yang akan menjadi panduan bagi unit organisasi pengelola (BKPSDKP) dalam melakukan pengelolaan kawasan. RPZ ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk melihat capaian dari tujuan pengelolaan dan dapat disesuaikan kembali apabila diperlukan.

4.2.1 Visi dan Misi

Visi kawasan konservasi TWP Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah **“Lestarinnya Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat di Taman Wisata Perairan Pulau Mare”**.

Misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan pengelola untuk dapat menjalankan rencana pengelolaan yang efektif dan efisien melalui kemitraan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem di TWP Pulau Mare.
3. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4. Melestarikan kearifan lokal terkait dengan budaya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan kawasan dan mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan konservasi.
7. Mengembangkan rencana bisnis kawasan untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi melalui pendanaan berkelanjutan.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

4.2.2.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan kawasan konservasi TWP Pulau Mare adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang lestari dan berkelanjutan secara efektif dan efisien.
2. Penguatan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui jejaring kawasan konservasi dan bekerjasama dengan akademisi, swasta, lembaga konservasi dan juga masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan–kegiatan konservasi seperti rehabilitasi, restorasi, penelitian, pendidikan, penyadartahuan dan penjangkauan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya.
4. Penguatan tata laksana unit pengelola kawasan melalui penyusunan standar prosedur pelaksanaan kegiatan untuk pengawasan, pemanfaatan dan juga pengelolaan sumber daya alam.
5. Pengembangan ekonomi masyarakat dalam kawasan TWP Pulau Mare berbasis keberlanjutan melalui kegiatan pelatihan, promosi, pemodalan dan pendampingan.

4.2.2.2 Sasaran Pengelolaan

Sasaran pengelolaan kawasan konservasi TWP Pulau Mare dibedakan menjadi tiga tujuan utama yaitu:

A. Sasaran Tata Kelola/Pengelolaan

1. Berkurangnya aktivitas perikanan dengan alat tangkap yang merusak sebesar 10% dari data dasar (2017) dalam waktu lima tahun setelah ditetapkan.

2. Tersusunnya paling sedikit dua standar, operasional dan prosedur (SOP) kegiatan, yaitu pemanfaatan dan pemantauan sumber daya dalam waktu tiga tahun setelah penetapan, serta terimplementasinya kegiatan pemanfaatan dan pemantauan sumber daya sesuai dengan standar yang ada dalam waktu lima tahun setelah penetapan kawasan konservasi.
3. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan berfungsinya kantor pengelola, sarana pengawasan dan pemantauan, serta sarana kegiatan ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam waktu lima tahun setelah penetapan.
4. Tersedianya skema pendanaan berkelanjutan lima tahun setelah penetapan.

B. Sasaran Sumber Daya Hayati

1. Meningkatkan persentase tutupan karang di seluruh zona inti sebesar 2% dari data dasar 2017 dalam waktu lima tahun dan meningkat 5% dalam waktu dua puluh tahun setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
2. Menjaga persentase tutupan karang di Sub Zona Pariwisata Alam Perairan tetap atau stabil seperti data dasar tahun 2017 dalam lima tahun pertama dan meningkat 2% waktu sepuluh tahun setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
3. Meningkatkan luasan mangrove dan tutupan mangrove sebesar 2% dari data dasar tahun 2014 dalam waktu sepuluh tahun setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi⁵.

C. Sasaran Sosial Ekonomi Budaya

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan sebesar 5% dari data dasar tahun 2017 dalam waktu sepuluh tahun setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
2. Meningkatkan pendapatan bruto sebesar 2% dari data dasar tahun 2017 dalam waktu sepuluh tahun setelah penetapan kawasan konservasi.

⁵ Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan karena kewenangan BKPSDKP hanya sampai pesisir

3. Menciptakan mata pencaharian alternatif di TWP Pulau Mare yang dapat mendukung perekonomian masyarakat dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan kawasan konservasi.

4.2.3 Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan yang akan diterapkan oleh unit pengelola TWP Pulau Mare mengacu pada sasaran dan tujuan pengelolaan yang dicapai dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Strategi pengelolaan mencakup beberapa aspek yang dikelola antara lain tata kelola, sumber daya alam dan sosial ekonomi. Berikut ini adalah strategi pengelolaan kawasan TWP Pulau Mare beserta program-program yang direncanakan:

1. Aspek tata kelola kelembagaan

Program yang bisa dijalankan terkait dengan aspek ini adalah:

- a) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan
- b) Inisiasi pembentukan jejaring dan kemitraan
- c) Pembangunan sarana dan prasarana
- d) Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan
- e) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
- f) Monitoring dan evaluasi

2. Aspek sumber daya alam

Program yang bisa dilakukan dalam aspek sumber daya alam adalah:

- a) Perlindungan dan pelestarian ekosistem dan populasi
- b) Pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya
- c) Pemantauan sumber daya
- d) Monitoring dan evaluasi

3. Aspek sosial ekonomi

- a) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Penjangkauan dan penyadartahuan
- d) Monitoring dan evaluasi

Strategi pengelolaan dan program-program ini kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun untuk penyesuaian dalam mencapai tujuan pengelolaan. Detail rencana jangka menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada Tabel 4-1 dan Tabel 4-2.

Rencana Jangka Panjang dan menengah ini merupakan rencana pengelolaan yang adaptif, dimana rencana kegiatan yang ada dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi kawasan konservasi.

4.3 Rencana Jangka Menengah dan Tahunan

Tabel 4-1 Rencana Kerja Jangka Panjang (20 tahun)

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 15 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
A. Tata kelola kelembagaan								
1. Peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, jejaring dan kemitraan	1.1 Penambahan personil unit pengelola kawasan (ASN dan non ASN)	√		√		APBD	1000	Dinas terkait
	1.2 Diklat dasar konservasi untuk personil unit pengelola	√		√		APBD, APBN	250	Dinas terkait, LSM, perguruan tinggi
	1.3 Diklat pengelolaan terumbu karang berbasis lingkungan	√		√		APBD, APBN	250	Pusat pelatihan KKP, Dinas terkait, LSM, perguruan tinggi
	1.4 Studi banding ke unit pengelola kawasan konservasi di daerah lain	√	√			APBD, APBN	200	Pemda terkait, Dinas terkait, LSM
	1.5 Diklat monitoring dan pengawasan kawasan untuk personil	√		√		APBD, APBN	50	Dinas terkait, LSM
	1.6 <i>Workshop</i> Pengembangan unit pengelola (peningkatan status, nomenklatur)		√			APBD	100	Dinas terkait, LSM
2. Pengembangan sarana dan prasarana	2.1 Pengadaan dan pemeliharaan kantor dan peralatan untuk unit pengelola	√	√			APBD APBN	4.500	Dinas terkait
	2.2 Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan merusak mangrove dan terumbu karang	√	√	√	√	APBD APBN	1200	Dinas terkait, LSM, Swasta, BUMN
	2.3 Pembuatan dan pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi (<i>mooring buoy</i>)	√	√	√	√	APBD APBN	1200	Dinas terkait, LSM
	2.4 Pengadaan sarana patroli dan pos pengawas	√				APBD APBN	1200	Bappeda, Dinas terkait

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 15 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
	2.5 Pembuatan sarana pembuangan sampah di dalam kawasan konservasi	√	√			APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM, Swasta, BUMN
3. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan	3.1 Penyusunan SOP monitoring dan pemanfaatan sumber daya	√				APBD APBN	900	Dinas terkait, LSM
	3.2 Penyusunan peraturan pemanfaatan sumber daya tingkat desa	√	√			APBD APBN	200	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM
	3.3 Penyusunan aturan tentang kegiatan wisata di kawasan konservasi	√	√			APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM
	3.4 Sosialisasi dan penyuluhan tentang kawasan konservasi dan aturan pengelolaan	√				APBD APBN	600	Dinas terkait, LSM
	3.5 Penyusunan aturan standar pelayanan minimum Unit pengelola	√				APBD APBN	200	LSM
	3.6 Penyusunan SOP Jejaring kerjasama pengelola kawasan konservasi		√			APBD APBN	1.000	Dinas terkait, LSM
4. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	4.1 <i>Workshop</i> identifikasi sistem pendanaan untuk UPTD	√	√			APBD APBN	800	Dinas terkait, LSM, Perguruan tinggi
	4.2 <i>Study visit</i> untuk sistem pendanaan di kawasan konservasi	√	√			APBN APBD	450	LSM
	4.3 Pembuatan rencana bisnis kawasan untuk pendanaan berkelanjutan	√	√			APBD APBN	600	Dinas terkait, LSM, Perguruan tinggi
5. Monitoring dan evaluasi	5.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan	√	√	√	√	APBN APBD	80	Dinas terkait, LSM
	5.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya	√				APBN APBD	90	LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 15 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
	5.3 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP	√				APBN APBD	390	LSM
B. Sumber daya alam								
6. Perlindungan dan pelestarian ekosistem dan populasi	6.1 Penanaman mangrove	√	√			APBD APBN	450	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM, swasta, BUMN
	6.2 Transplantasi terumbu karang		√			APBD APBN	360	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM, swasta, BUMN
	6.3 Penelitian tentang jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap serta musim tangkapan		√	√		APBD APBN	1000	LSM, Perguruan tinggi
	6.4 Kajian kesesuaian, daya dukung dan daya tampung untuk kegiatan wisata di kawasan konservasi		√			APBD APBN	400	LSM, Perguruan tinggi
	6.5 Pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan					APBD APBN	900	Dinas terkait, BUMN, Swasta
	6.6 Pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak dan generasi muda	√				APBD APBN	400	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM
7. Pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya	7.1 Patroli dan pengawasan kawasan secara berkala	√	√	√	√	APBD APBN	1000	Dinas terkait
	7.2 Pelibatan POKMASWAS dalam pengawasan	√	√	√	√	APBD APBN	400	Dinas terkait, Pemerintah desa, LSM
	7.3 Pembuatan mekanisme pelaporan pelanggaran	√				APBN APBD	150	Dinas terkait, LSM, dinas terkait
	7.4 Pembangunan sarana wisata di kawasan konservasi		√	√		APBD APBN	900	Bappeda, Dinas terkait, LSM
8. Pemantauan sumber daya	8.1 Pemantauan terumbu karang dan lamun	√	√	√	√	APBD APBN	1200	LSM, Perguruan tinggi
	8.2 Pemantauan Ekosistem Mangrove	√	√	√	√	APBD	1000	LSM, Perguruan tinggi

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 15 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
						APBN		
	8.3 Pemantauan persepsi tentang pengelolaan sumber daya		√	√	√	APBD APBN	520	LSM, Perguruan tinggi
	8.4 Pemantauan stok ikan target	√	√	√	√	APBD APBN	1000	LSM, Perguruan tinggi
C. Sosial ekonomi								
9. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	9.1 Pembentukan pilot projek pengembangan wisata bahari (destinasi wisata)	√	√	√	√	APBD APBN	2.000	Bappeda, Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM, BUMN, Swasta
	9.2 Pembangunan bank sampah untuk mengurangi sampah dan limbah	√		√		APBN APBD	500	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM, Perguruan tinggi
	9.3 Pembentukan kelompok wisata untuk mengelola wisata bahari di dua desa	√				APBD APBN	200	Dinas terkait, Pemerintah desa, LSM
	9.4 Pembentukan kelompok perempuan untuk makanan olahan dari ikan dan Ekosistem mangrove	√	√			APBD APBN	200	Dinas terkait, Pemerintah desa, LSM
10. Pemberdayaan masyarakat	10.1 Pelatihan dan sosialisasi pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah	√	√			APBD APBN	150	Dinas terkait, LSM
	10.2 Pelatihan pembuatan biogas skala rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif	√				APBD APBN	60	Dinas terkait, LSM
	10.3 Pelatihan pemandu wisata bahari		√			APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM
	10.4 Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan		√			APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM
	10.5 Pelatihan untuk mengolah mangrove menjadi bahan makanan		√			APBD APBN	200	Dinas terkait, LSM
							600	Dinas terkait, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	5 Tahun I	5 tahun II	5 tahun III	5 tahun IV	Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 15 tahun (juta rupiah)	Mitra Potensial
11. Penjangkauan dan penyadartahuan	11.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi	√				APBD APBN		
	11.2 Penyediaan fasilitas pusat informasi tentang kawasan konservasi dan biota yang dilindungi	√				APBD APBN	300	LSM, Swasta, BUMN
12. Pemantauan sosial ekonomi	12.1 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi	√	√	√	√	APBD APBN	400	Dinas terkait, LSM

Tabel 4-2 Program Kerja Jangka Menengah (5 tahun)

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
A. Tata kelola kelembagaan										
1. Peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, jejaring dan kemitraan	1.1 Penambahan personil unit pengelola kawasan (ASN dan non ASN) - Persiapan perekrutan (<i>assessment</i> kebutuhan staf pengelola) - Penyebarluasan informasi perekrutan staf sesuai kebutuhan - Peninjauan kadidat staf dan <i>interview</i> - SK kandidat terpilih	Tersedianya personil sesuai kebutuhan (1 orang pertahun)	100	100	100	100	100	APBD	500	Dinas terkait (BKD)
	1.2 Diklat dasar konservasi untuk personil unit pengelola - Persiapan Diklat - <i>Pre test</i> - <i>Post test</i> - Laporan kegiatan	Sedikitnya 1 personil terlatih pertahun	25	12,5	37,5	25	25	APBD, APBN,	125	Dinas Terkait, Perguruan Tinggi, LSM.
	1.3 Diklat pengelolaan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Persiapan diklat - <i>Pre test</i> dan <i>Post test</i> - Diklat survei ekosistem pesisir - Laporan kegiatan	10 personil terlatih	50	75		75	50	APBD, APBN,	250	BRSDMKP, Pemerintah Pusat terkait, BPSDM Maluku Utara, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM
	1.4 Studi banding ke kawasan konservasi lain - Pemilihan lokasi untuk studi banding - Pemilihan kandidat staf untuk ikut studi banding - Laporan hasil studi banding dan pembelajaran untuk staf lainnya	2 kali studi banding	100			100		APBD, APBN,	200	Bappeda, Pemda terkait, Dinas terkait, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	1.5 Diklat pemantauan dan pengawasan kawasan untuk personil <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan diklat - Praktek survei/pemantauan lokasi kawasan - Laporan hasil praktek pemantauan dan pengawasan 	2 personil terlatih	50					APBD, APBN,	50	Dinas terkait, LSM
	1.6 <i>Workshop</i> Pengembangan unit pengelola (peningkatan status, nomenklatur) <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan materi <i>workshop</i> - Pelaksanaan <i>workshop</i> - Laporan hasil <i>workshop</i> 	4 kali <i>workshop</i>			100			APBD	100	Bappeda, Dinas terkait, LSM
2. Pengembangan sarana dan prasarana	2.1 Pengadaan dan pemeliharaan kantor dan peralatan untuk unit pengelola <ul style="list-style-type: none"> - Kajian lokasi pembangunan kantor - Pembangunan kantor unit pengelola - Pemeliharaan kantor dan peralatan unit kantor pengelola 	1 unit kantor	250	400	400	250	200	APBD APBN	1.500	Bappeda, Dinas terkait
	2.2 Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan merusak mangrove dan terumbu karang <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi pemasangan papan informasi - Pembuatan papan informasi tentang kawasan konservasi - Pemasangan papan informasi kawasan konservasi dan aturan merusak mangrove 	8 papan informasi terpasang dan yang rusak dapat diganti (maksimal 8 papan pengganti)	100		100		100	APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM, Swasta, BUMN

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	2.3 Pembuatan dan pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi (<i>mooring buoy</i>) - Identifikasi lokasi batas kawasan dan zonasi - Pembuatan <i>mooring buoy</i> - Pemasangan batas kawasan dan batas zonasi	20 <i>mooring buoy</i> dan diganti apabila ada yang rusak (maksimal 60 <i>mooring buoy</i>)	50	50	75	75	50	APBD APBN	300	Dinas terkait, LSM
	2.4 Pengadaan sarana patroli dan pos pengawas - Identifikasi lokasi pembangunan pos pengawasan - Pembangunan pos pengawasan - Pengadaan sarana patroli (teropong, GPS, kamera, jaket pelampung dll)	2 pos pengawasan, 2 alat komunikasi	100	150	150			APBD APBN	400	Bappeda, Dinas terkait
	2.5 Pembuatan sarana pembuangan sampah di dalam kawasan konservasi - Persiapan (survei dan identifikasi kawasan) - Pembuatan sarana pembuangan sampah - Perawatan sarana dan monitoring	10 tempat pembuangan sampah		50		50		APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM, Swasta, BUMN
3. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan	3.1 Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi sumber daya - Rapat persiapan penyusunan SOP - Penyusunan SOP	1 SOP pemanfaatan, 1 SOP monitoring	50	50				APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM
	3.2 Penyusunan peraturan pemanfaatan sumber daya tingkat desa - Rapat persiapan pemanfaatan sumber daya tingkat desa	1 aturan pemanfaatan di setiap desa		100				APBD APBN	100	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	- Penyusunan peraturan pemanfaatan sumber daya									
	3.3 Penyusunan aturan tentang kegiatan wisata di kawasan konservasi - Rapat persiapan - Penyusunan SOP kegiatan wisata di kawasan konservasi	1 aturan kegiatan wisata di kawasan		100				APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM
	3.4 Sosialisasi dan penyuluhan tentang kawasan konservasi dan aturan pengelolaan - Penyiapan materi sosialisasi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi dan aturan pengelolanya	6 kali sosialisasi	50	50	50			APBD APBN	150	Dinas terkait, LSM
	3.5 Penyusunan aturan standar pelayanan minimum unit pengelola - Penyiapan materi - Rapat penyusunan aturan standar pelayanan minimum unit pengelola - Laporan aturan standar pelayanan minimum unit pengelola	1 aturan pelayanan minimum	50					APBD APBN	50	LSM
4. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	4.1 <i>Workshop</i> identifikasi sistem pendanaan - Persiapan <i>workshop</i> - <i>Workshop</i> indentifikasi sistem pendanaan - Laporan	2 kali <i>workshop</i>			100	100		APBD APBN	200	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM.
	4.2 Kunjungan lapangan dalam rangka persiapan inisiasi sistem pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi - Persiapan	1 kali studi visit				150		APBN APBD	150	LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan lapangan di kawasan konservasi - Laporan 									
	4.3 Pembuatan rencana bisnis kawasan untuk pendanaan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana bisnis kawasan - Konsultasi hasil penyusunan rencana bisnis kawasan 	1 dokumen rencana bisnis		200				APBD APBN	200	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM
5. Monitoring dan evaluasi	5.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Rapat - Rapat Evaluasi - Laporan hasil rapat evaluasi unit pengelola 	5 Laporan tahunan	40	40	40	40	40	APBN APBD	200	Dinas terkait
	5.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pemasangan papan informasi kawasan dan pemanfaatan sumber daya - Laporan monitoring 	Laporan monitoring	50		50		50	APBN APBD	150	Dinas terkait, LSM.
	5.3 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring penerapan SOP - Laporan hasil evaluasi penerapan SOP 	3 laporan evaluasi SOP		30	30	30		APBN APBD	90	Dinas Terkait
B. Sumber daya alam										

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
6. Perlindungan dan pelestarian ekosistem dan populasi	6.1 Penanaman mangrove - Survei lokasi dan identifikasi kesesuaian jenis - Penyediaan bibit Mangrove - Kegiatan Penanaman Mangrove - Laporan kegiatan	2 kali penanaman mangrove			75		75	Sumber lain yang tidak mengikat	150	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM, Swasta, BUMN.
	6.2 Transplantasi terumbu karang - Survei lokasi dan identifikasi lokasi yang berpotensi - Penyiapan anakan terumbu karang - Kegiatan transplantasi karang - Laporan kegiatan	2 kali transplantasi karang		30		30		APBD APBN	60	Dinas terkait, Perguruan tinggi, LSM, Swasta, BUMN.
	6.3 Penelitian tentang jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap serta musim tangkapan (kajian <i>stock assessment</i>) - Kajian metodologi - Pengumpulan data sekunder dan lapangan - Analisis data - Laporan hasil penelitian	1 laporan penelitian		250				APBD APBN	250	Perguruan tinggi, LSM.
	6.4 Kajian kesesuaian, daya dukung dan daya tampung untuk kegiatan pariwisata di kawasan konservasi - Kajian metodologi - Pengumpulan data sekunder dan lapangan - Analisis data - Laporan hasil penelitian	1 laporan penelitian		200				APBD APBN	200	Perguruan tinggi, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	6.5 Pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan - Survei lapangan (identifikasi kebutuhan) - Pengadaan alat tangkap - Laporan pengadaan	6 kali pengadaan alat tangkap		100	100	100		APBD APBN	300	Dinas terkait, BUMN, Swasta
	6.6 Pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak dan generasi muda - Penyiapan materi - Pelaksanaan kegiatan - Laporan kegiatan	2 sekolah 2 kelompok pemuda 2 kelompok perempuan	20	20	20	20	20	APBD APBN	100	Dinas terkait, Pemerintah desa, LSM
7. Pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya	7.1 Patroli dan pengawasan gabungan di kawasan secara berkala - Persiapan - Patroli - Laporan patroli	10 kali patroli	50	50	50	50	50	APBD APBN	250	Dinas terkait
	7.2 Pelibatan POKMASWAS dalam pengawasan - Pertemuan koordinasi - Pelaksanaan patroli mingguan - Laporan bulanan	20 kali	20	20	20	20	20	APBD APBN	100	Dinas terkait, Pemerintah desa, LSM
	7.3 Pembuatan mekanisme pelaporan pelanggaran - Persiapan - Penyusunan mekanisme pelaporan pelanggaran	1 dokumen mekanisme pelaporan	50					APBN APBD	50	Dinas terkait, LSM
	7.4 Pembangunan sarana wisata di kawasan konservasi - Kajian lingkungan - Survei lokasi - Identifikasi potensi wisata - Pengadaan sarana wisata - Pembangunan sarana wisata	2 sarana wisata		150	150			APBD APBN	300	Bappeda, Dinas terkait, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
8. Pemantauan sumber daya	8.1 Pemantauan terumbu karang dan lamun - Kajian metodologi - Survei lokasi - Pemantauan terumbu karang dan lamun - Laporan pemantauan	5 laporan pemantauan dan data <i>time series</i>	25	50	50	75	75	APBD APBN	275	LSM, Perguruan tinggi
	8.2 Pemantauan ekosistem mangrove - Kajian metodologi - Survei lokasi - Pemantauan ekosistem mangrove - Laporan pemantauan	5 laporan pemantauan dan data <i>time series</i>	50	50	50	50	50	APBD APBN	250	Dinas Lingkungan Hidup, LSM, Perguruan tinggi
	8.3 Pemantauan persepsi tentang pengelolaan sumber daya - Persiapan pembuatan kuisisioner - Survei dan identifikasi lokasi - Survei persepsi dengan masyarakat - Laporan hasil persepsi masyarakat	2 laporan pemantauan		60			60	APBD APBN	120	LSM, Perguruan tinggi
	8.4 Pemantauan stok ikan target konservasi - Kajian metodologi - Pengumpulan data sekunder dan lapangan - Analisis data - Laporan hasil analisis stok ikan	5 laporan pemantauan	50	50	50	50	50	APBD APBN	250	Bappeda, LSM, perguruan tinggi
C. Sosial ekonomi budaya										
9. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	9.1 Pembentukan <i>pilot project</i> pengembangan wisata bahari - Kajian lokasi pengembangan wisata bahari - Persiapan	2 <i>pilot project</i>		250		250		APBD APBN	500	Bappeda, Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM, BUMN, Swasta

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan <i>pilot project</i> pengembangan wisata (destinasi wisata) - Laporan hasil 									
	9.2 Pembangunan bank sampah untuk mengurangi sampah dan limbah <ul style="list-style-type: none"> - Kajian lokasi pembangunan bank sampah - Rapat persiapan pembangunan bank sampah - Pengoperasian bank sampah 	2 bank sampah		75	100		75	APBN APBD	250	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM, perguruan tinggi
	9.3 Pembentukan kelompok wisata untuk mengelola wisata bahari di dua desa <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kelompok wisata di dua Desa - Persiapan pembentukan kelompok wisata - Pembentukan kelompok wisata 	4 kelompok wisata di dua desa		100				APBD APBN	100	Dinas Terkait, Pemerintah Desa, LSM
	9.4 Pembentukan kelompok perempuan untuk makanan olahan dari ikan dan mangrove <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kelompok perempuan - Pembentukan kelompok perempuan untuk makanan olahan ikan dan mangrove - Pelatihan kelompok 	4 kelompok perempuan terbentuk		100				APBD APBN	100	Dinas terkait, Pemerintah Desa, LSM
10. Pemberdayaan masyarakat	10.1 Pelatihan dan sosialisasi pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan materi sosialisasi dan pelatihan - Sosialisasi tentang pemanfaatan sampah - Pelatihan pemanfaatan sampah - Laporan hasil pelatihan 	4 kali pelatihan		25	25	25	25	APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	10.2 Pelatihan pembuatan biogas skala rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif - Persiapan pelatihan - Pelatihan - Laporan hasil pelatihan	2 kali pelatihan		30	30			APBD APBN	60	Dinas terkait, LSM
	10.3 Pelatihan pemandu wisata bahari - Persiapan pelatihan - Pelatihan - Laporan hasil pelatihan	4 kali pelatihan		25	25	25	25	APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM
	10.4 Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan - Persiapan pelatihan - Pelatihan - Laporan hasil pelatihan	2 kali pelatihan		50		50		APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM
	10.5 Pelatihan untuk mengolah mangrove menjadi bahan makanan - Persiapan pelatihan - Pelatihan - Laporan hasil pelatihan	2 kali pelatihan		50	50			APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM
	11. Penjangkauan dan penyadartahuan	11.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Persiapan materi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Laporan hasil sosialisasi	5 paket sosialisasi	25	25	50	25	25	APBD APBN	150
	11.2 Penyediaan fasilitas pusat informasi tentang kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Persiapan bahan materi - Pengadaan sarana dan produksi materi tentang kawasan	1 paket fasilitas pusat informasi		100				APBD APBN	100	LSM, Swasta, BUMN

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Kebutuhan anggaran tiap tahun (juta rupiah)					Sumber Pendanaan	Kebutuhan anggaran dalam 5 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan Mitra
			2020	2021	2022	2023	2024			
	konservasi dan biota yang di lindungi									
12. Monitoring sosial ekonomi	12.1 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi - Persiapan rencana monitoring - Monitoring sosial ekonomi - Laporan hasil monitoring dan evaluasi	5 kali monitoring, 5 laporan hasil monitoring		25	25	25	25	APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM

Tabel 4-3 Rencana Kerja Jangka Pendek (1 tahun)

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
A. Tata kelola kelembagaan									
1. Pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, jejaring dan kemitraan	1.1 Penambahan personil unit pengelola kawasan (ASN dan non ASN) – Persiapan perekrutan (<i>assessment</i> kebutuhan staf pengelola) – Penyebarluasan informasi perekrutan staf sesuai kebutuhan – Peninjauan kadidat staf dan <i>interview</i> – SK kandidat terpilih	Tersedianya 2 orang non ASN	50	50			APBD	100	Dinas terkait
	1.2 Pelatihan dasar konservasi untuk personil unit pengelola – Persiapan Pelatihan – <i>Pre test</i> – <i>Post test</i> – Laporan	2 orang terlatih			25		APBD, APBN	25	LSM, perguruan tinggi, dinas terkait
	1.3 Pelatihan pengelolaan terumbu karang berbasis lingkungan – Persiapan Pelatihan – <i>Pre test</i> dan <i>Post test</i> – Pelatihan survei terumbu karang – Laporan	2 orang terlatih			50		APBD, APBN	50	LSM, perguruan tinggi, pusat pelatihan KKP, dinas terkait
	1.4 Studi banding ke unit pengelola kawasan konservasi di daerah lain – Pemilihan lokasi untuk studi banding – Pemilihan kandidat staf untuk ikut studi banding – Laporan hasil studi banding dan pembelajaran untuk staf lainnya	1 laporan studi banding dan 1 sesi berbagi pembelajaran		100			APBD, APBN	100	Dinas terkait, LSM, Pemda terkait

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
	1.5 Pelatihan monitoring dan pengawasan kawasan untuk personil <ul style="list-style-type: none"> – Persiapan pelatihan – Praktek survei/monitoring lokasi kawasan – Laporan hasil praktek monitoring dan pengawasan 	2 orang terlatih				50	APBD, APBN	50	Dinas terkait, LSM
2. Pengembangan sarana dan prasarana	2.1 Pengadaan dan pemeliharaan kantor dan peralatan untuk unit pengelola <ul style="list-style-type: none"> – Kajian lokasi pembangunan kantor – Pembangunan kantor unit pengelola – Pemeliharaan kantor dan peralatan unit kantor pengelola 	1 unit kantor tersedia dan berfungsi	50	100	100		APBD APBN	250	Dinas terkait
	2.2 Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan merusak mangrove dan terumbu karang <ul style="list-style-type: none"> – Identifikasi lokasi pemasangan papan informasi – Pembuatan materi papan informasi – Pembuatan papan informasi tentang kawasan konservasi – Pemasangan papan informasi kawasan konservasi dan aturan merusak mangrove 	8 papan informasi terpasang		100			APBD APBN	100	Dinas terkait, LSM, Swasta, BUMN
	2.3 Pembuatan dan pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi (<i>mooring buoy</i>) <ul style="list-style-type: none"> – Identifikasi lokasi batas kawasan dan zonasi – Pembuatan <i>mooring buoy</i> 	20 <i>mooring buoy</i> terpasang		50			APBD APBN	50	Dinas terkait, LSM

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan batas kawasan dan batas zonasi - Laporan pemasangan 								
	2.4 Pengadaan sarana patroli dan pos pengawas <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi pembangunan pos pengawasan - Pembangunan pos pengawasan - Pengadaan sarana patroli (teropong, GPS, kamera, jaket pelampung dll) 	2 pos pengawasan dan 2 alat komunikasi	100			APBD APBN	100		
3. Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan	3.1 Penyusunan SOP monitoring dan pemanfaatan sumber daya <ul style="list-style-type: none"> - Rapat persiapan penyusunan SOP - Penyusunan SOP 	1 SOP pemanfaatan 1 SOP monitoring		50		APBD APBN	50	LSM, dinas terkait	
	3.2 Sosialisasi dan penyuluhan tentang kawasan konservasi dan aturan pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan materi sosialisasi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi dan aturan pengelolaannya 	2 laporan kegiatan sosialisasi		25	25	APBD APBN	50	LSM, dinas terkait	
	3.3 Penyusunan aturan standar pelayanan minimum unit pengelola <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan materi - Rapat penyusunan aturan standar pelayanan minimum unit pengelola 	1 dokumen standar pelayanan minimum	50			APBD APBN	50	LSM	

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
	<ul style="list-style-type: none"> – Laporan aturan standar pelayan minimum unit pengelola 								
4. Monitoring dan evaluasi	4.1 Rapat evaluasi unit pengelola kawasan setiap tiga bulan <ul style="list-style-type: none"> – Persiapan Rapat – Rapat Evaluasi – Laporan hasil rapat evaluasi unit pengelola 	4 kali rapat	10	10	10	10	APBN APBD	40	
	4.2 Monitoring pemasangan papan informasi tentang kawasan konservasi dan aturan pemanfaatan sumber daya <ul style="list-style-type: none"> – Monitoring pemasangan papan informasi kawasan dan pemanfaatan sumber daya – Laporan monitoring 	2 laporan monitoring		25	25		APBN APBD	50	
B. Sumber daya alam									
5. Perlindungan, pelestarian ekosistem dan populasi	5.1 Pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak dan generasi muda <ul style="list-style-type: none"> – Penyiapan materi – Pelaksanaan kegiatan – Laporan kegiatan 	2 sekolah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup 1 kelompok pemuda/pemudi mendapatkan pendidikan lingkungan hidup		20			APBD APBN	20	LSM, dinas terkait, Pemerintah desa
6. Pengendalian, pengawasan dan	6.1 Patroli dan pengawasan kawasan secara berkala <ul style="list-style-type: none"> – Persiapan – Patroli 	2 kali patroli		25		25	APBD APBN	50	Dinas terkait

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
pemanfaatan sumber daya	– Laporan patroli								
	6.2 Pelibatan POKMASWAS dalam pengawasan – Pertemuan koordinasi – Pelaksanaan patroli mingguan – Laporan triwulan	2 kali sebulan	20				APBD APBN	20	Pemerintah desa, LSM, dinas terkait
	6.3 Pelatihan Pokmaswas – Persiapan – Pelatihan – Laporan pelatihan	1 kali pelatihan dasar 1 kali pelatihan lanjutan		20			APBD APBN	20	Pemerintah Desa, LSM, Dinas terkait
	6.4 Pembuatan mekanisme pelaporan pelanggaran – Persiapan – Penyusunan mekanisme pelaporan pelanggaran	1 dokumen mekanisme pelaporan	50				APBN APBD	50	LSM, dinas terkait
7. Pemantauan sumber daya	7.1 Pemantauan terumbu karang dan lamun – Kajian metodologi – Survei lokasi – Pemantauan terumbu karang dan lamun – Laporan pemantauan	1 laporan hasil monitoring				100	APBD APBN	100	LSM, perguruan tinggi
	7.2 Pemantauan mangrove – Kajian metodologi – Survei lokasi – Pemantauan Mangrove – Laporan pemantauan	1 laporan hasil monitoring				100	APBD APBN	100	LSM, perguruan tinggi
	7.3 Pemantauan stok ikan target konservasi – Kajian metodologi – Pengumpulan data sekunder dan lapangan	1 laporan hasil monitoring				50	APBD APBN	50	LSM, perguruan tinggi

Strategi pengelolaan/ Program	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan) Tahun 2020				Sumber Pendanaan	Kebutuhan Anggaran dalam 1 tahun (juta rupiah)	Pelaksana dan mitra
			I	II	III	IV			
	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis data - Laporan hasil analisis stok ikan 								
C. Sosial ekonomi									
8. Penjangkauan dan penyadartahuan	8.1 Sosialisasi tentang manfaat kawasan konservasi dan biota yang dilindungi <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan materi - Sosialisasi tentang kawasan konservasi dan biota yang dilindungi - Laporan hasil sosialisasi 	1 paket sosialisasi		20			APBD APBN	20	LSM, dinas terkait

5 Penutup

Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Pulau Mare merupakan pedoman dalam pengelolaan sumber daya laut secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat visi dan misi, sasaran dan tujuan pengelolaan serta rencana jangka menengah dan tahunan TWP Pulau Mare. Selain itu juga data tentang ekosistem, sosial ekonomi dan budaya juga tersedia dalam RPZ ini yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan serta membantu dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Daftar Pustaka

- Akbar, N., Baksir, A., Tahir, I., & Arafat, D. (2016). Struktur komunitas mangrove di Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Community structure of mangrove in Mare Island, Tidore City, Maluku Utara Province. *DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, 5(3).
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan. 2019. *Kecamatan Tidore Selatan Dalam Angka 2019*. Kota Tidore Kepulauan.
- Bappeda Kota Tidore Kepulauan. 2010. *RTRW Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2030; Laporan Akhir*. Kota Tidore Kepulauan.
- Bessho, B. (1944). Geology of the Halmahera islands. *Geographical Journal*, 664, 145-203.
- Dhannahisvara, A.J, & Pingkan, J. 2019. *Kompilasi hasil analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis Terhadap Perairan Maluku Utara*. Bogor. WCS-IP
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. 2011. *Identifikasi dan Penilaian Potensi CKKP di Maluku Utara*. Sofifi, DKP Prov Maluku Utara.
- Iqra, I., Tjahjono, B., & Sunarti, E. (2012). Studi Geomorfologi Pulau Ternate dan Penilaian Bahaya Longsor. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 14(1), 1-6.
- Lestari, WP. 2017. *Laporan Survei Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Maluku Utara 2017*. Wildlife Conservation Society - Indonesia Program. Bogor. Indonesia.
- Muttaqin, A. Pardede, S. Tarigan, S. A. Setiawan, F. Muhidin. 2017. *Profil Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Maluku Utara*. Wildlife Conservation Society - Indonesia Program. Bogor. Indonesia.
- Retnoningtyas, H., Yuwandana. D.P., Karepesina, H. & Yulianto, I. 2018. *Sustainable Ecosystems Advanced Project: Laporan survei pelingkupan kegiatan perikanan tangkap Provinsi Maluku Utara*. USAID SEA Project.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Analisis Kriteria Tipe Kawasan KKP3K Pulau Mare



Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penentuan Jenis/tipe/kategori Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)

No	Kriteria	Penilaian	TNP	TWP	SAP	SP	TP	TPK	SPs	SPK
1	Keanekaragaman Hayati	3	3	2	3	2	2	2	3	3
2	Kealamiahn	2	3	1	3	2	1	1	3	3
3	Keterwakilan	3	3	1	3	2	1	1	3	3
4	Keunikan	2	3	2	3	3	2	2	2	2
5	Daerah Ruaya	3	2	2	3	3	2	2	3	3
6	Habitat Ikan Khas/Langka dan Endemik	1	3	2	3	3	2	2	3	3
7	Ikan Dilindungi	2	3	2	3	3	2	2	3	3
8	Ikan yang Perlu Dilindungi	1	2	1	2	3	2	2	2	3
9	Potensi Rekreasi dan Pariwisata	3	3	3	2	1	3	3	1	1
10	Kemudahan Pencapaian Lokasi	3	3	3	1	1	3	3	1	1
11	Pemanfaatan kawasan utk Pariwisata	3	2	3	2	1	3	3	2	1
12	keunikan budaya	3	3	3	2	2	3	3	2	2
13	Daerah Pemijahan Ikan	2	3	2	3	3	2	2	3	3
14	Daerah Pengasuhan	2	2	2	3	3	2	2	3	3
15	Nilai Penting Perikanan	3	3	3	1	1	3	3	1	1
16	Kepentingan Strategis	Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
17	Calon kawasan melingkupi: a. Daratan besar/pesisir b. pulau-pulau kecil	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	tidak	ya	tidak
		tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	tidak	ya

Score
REKOMENDASI CKKP3K

Mandat UU31				Mandat UU27			
2.970,00	3.240,00	1.433,33	973,33				
TNP	TWP						

Keterangan:



Rekomendasi UTAMA



Rekomendasi Alternatif

*Calon Pengelola hanya di perkenankan untuk mengisi pada kolom "Penilaian" yang di blok hitam

Lampiran 2. SK Pencadangan KKP Pulau Mare oleh Walikota Tidore Kepulauan



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 72.2 TAHUN 2012

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PULAU MARE DAN LAUT SEKITARNYA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem laut di kawasan perairan Pulau Mare dan laut di sekitarnya di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya ikan khususnya Lumba-lumba tutup botol (*Tursiops truncatus*), perlu menetapkan Pulau Mare dan laut di sekitarnya di Kota Tidore Kepulauan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Mare dan Laut di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

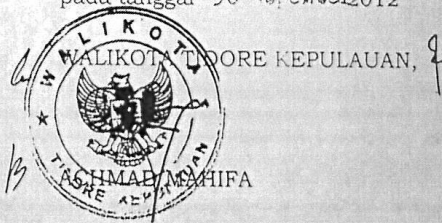
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Mare Di Kota Tidore Kepulauan.
- KEDUA** : Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Mare dan laut di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dicadangkan sebagai Suaka Pulau Kecil.

- KETIGA : Pencadangan Suaka Pulau Kecil Pulau Mare dan Laut Di Sekitarnya di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari wilayah Pesisir Pulau Mare seluas 603,7 Ha (sekian hektar) dan wilayah perairan Pulau Mare seluas 2,206 Ha (sekian hektar), dengan total luas keseluruhan 2,810 Ha (sekian hektar).
- KEEMPAT : Peta dan Batas Koordinat Pencadangan Suaka Pulau Kecil Pulau Mare dan Laut di Sekitarnya di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan Suaka Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ditugaskan untuk menyiapkan satuan organisasi pengelola Suaka Pulau Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 November 2012



LAMPUAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 72.2 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 September 2012
TENTANG : PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PULAU MARE DAN LAUT DISEKITARNYA DI KOTA TIDORE
KEPULAUAN

KOORDINAT KAWASAN PERAIRAN PULAU MARE

LOKASI

- Lokasi Pencadangan : Pulau Mare
- Kecamatan : Tidore Selatan
- Kota : Kota Tidore Kepulauan
- Provinsi : Maluku Utara

DAFTAR KOORDINAT

No Titik	Garis Lintang (LU)	Garis Bujur (BT)
1	0°35'1.29"N	127°25'28.69"E
2	0°33'17.41"N	127°25'22.83"E
3	0°32'17.41"N	127°25'1.09"E
4	0°33'2.91"N	127°22'30.34"E
5	0°34'27.98"N	127°22'4.11"E
6	0°35'42.67"N	127°23'35.31"E

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 4

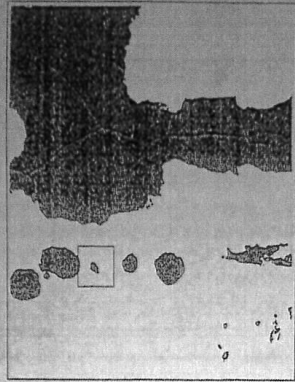
9/9
ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 72.2 TAHUN 2012
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012
 TENTANG : PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU MARE DAN LAUT DI SEKITARNYA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU MARE DAN LAUT DI SEKITARNYA



SKALA 1:50000



- Legenda :**
- Titik Koordinat
 - Desa/ Kelurahan
 - ▨ Mangrove
 - ▨ Terumbu Karang
 - ▨ Batas Wilayah Pengelolaan Laut
 - ▨ Kawasan Konservasi Perairan
 - ▨ Wilayah Kota Tidore Kepulauan

Keterangan :
 Lulus Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau Mare dan Laut Sekitarnya yang Dibudayakan adalah 2.763,01 Ha

